



PRAKTEK BAIK



**Pengakuan Negara Terhadap Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR)
Secara Tertulis “SK Pengakuan dan Bukti Pencatatan SPPR”**

**Tim Pewawancara:
Warisah, Wahyu Widi Astuti, Tri Wahyu, Iswati**

Penulis: Hikmah Diniah, Tri Wahyu, Martini
Editor: Tri Wahyu
Penanggung jawab: Amin Muftiyanah
Pendukung: Program MAMPU

PRAKTEK BAIK

Pengakuan Negara Terhadap Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR)

Secara Tertulis “SK Pengakuan dan Bukti Pencatatan SPPR”

© Hikmah Diniah, Tri Wahyu, Martini

xvi + 76 halaman; 14,5 x 21 cm.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-602-506xxxx

Editor: Tri Wahyu

Pemeriksa Aksara: Shoffan Hanafi

Perancang Sampul: M. Rizal Abdi

Penata Letak: Goes Im



Cetakan I, Desember 2018

Diterbitkan oleh:

Yayasan Annisa Swasti (YASANTI).

Didukung oleh Program MAMPU

Publication Disclaimer



Publikasi ini telah disusun dan di cetak oleh Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

PENGANTAR



Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 28 September 1982 oleh 6 orang aktivis di Yogyakarta yaitu: Sri Kusyuniati, Budi Wahyuni, Kumoro Dewi, Siti Muslimah Widyastuti, Siti Noor Djannah Djohantini, dan Iin Insiyah, yang masa itu masih sebagai mahasiswi yang aktif di kegiatan kampus maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah mendorong kemandirian perempuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya melalui pengorganisasian dan penyadaran, penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, advokasi dan pengembangan ekonomi bagi perempuan pekerja antara lain: buruh gendong yang ada di pasar tradisional di Yogyakarta, perempuan pekerja pumahan (putting out sistem), dan buruh industri yang ada di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.

Dalam melakukan kerja-kerjanya, YASANTI melibatkan banyak pihak baik individu, lembaga, dari pemerintah maupun non pemerintah, dari tingkat lokal, nasional dan internasional. Baik secara financial maupun non financial untuk mendorong kemandirian perempuan di segala bidang.

Dalam rangka mendorong kebijakan perlindungan bagi pekerja rumahan, sejak 2013 yang lalu YASANTI bekerjasama dengan MAMPU Jakarta. Merupakan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Melalui pengorganisasian dan penguatan kapasitas bagi pekerja rumahan, advokasi kebijakan dan penguatan jaringan di tingkat lokal maupun nasional.

Di Provinsi DIY, kegiatan yang dilakukan antara lain penguatan kapasitas melalui sekolah perempuan yang berperspektif gender, praktek advokasi melalui lobby, dialog dengan pemerintah di tingkat desa, kabupaten dan sampai provinsi, penguatan jaringan antara pekerja rumahan antar Desa/kelurahan, Kabupaten/kota dan antar provinsi, akses program pemerintah seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pendidikan dan pelatihan, dan kerja-kerja mendorong kebijakan dan perlindungan lainnya bagi perempuan pekerja rumahan lainnya.

Dalam rangka mendokumentasikan praktek baik dari program yang telah dilakukan yaitu kebijakan pengakuan dan perlindungan bagi perempuan pekerja rumahan berupa SK Pengakuan dan Pencatatan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Surat Bukti Pencatatan Serikat dari Disnaker, YASANTI melakukan serangkaian kegiatan antara lain wawancara dengan berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam proses kerja-kerja mendorong kebijakan dan perlindungan bagi perempuan pekerja rumahan. Dari pekerja rumahan sendiri, pemerintah yang terkait, pengambil kebijakan, dari pemerintah Desa sampai Provinsi,

jaringan yang mendukung, pengusaha dan tidak ketinggalan dari internal YASANTI sendiri. Hasil dari wawancara ini didokumentasikan, dibukukan dan dipublikasikan (launching) ke masyarakat yang lebih luas. Diharapkan melalui buku praktek baik ini selain sebagai pembelajaran bagi pihak-pihak terlibat dalam advokasi selama ini, juga makin mendapat dukungan (support) dari masyarakat yang lebih luas sehingga makin mengoptimalkan perjuangan pengakuan dan perlindungan bagi perempuan pekerja rumahan.

Demikian pengantar dari YASANTI, dukungan (support) dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk mencapai cita-cita dan terwujudnya kesejahteraan bagi perempuan pekerja rumahan di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

“PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN ADALAH PEKERJA DAN PERLU PERLINDUNGAN”

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Amin Muftiyanah

Direktur Eksekutif YASANTI

**Tema: Pengakuan Serikat Perempuan Pekerja
Rumah Secara Tertulis “SK Pengakuan SPPR”**

Organisasi dari 5 serikat perempuan pekerja rumahan ini awalnya belum mendapatkan perlindungan terutama pengakuan sebagai organisasi pekerja dari pemerintah desa dan kabupaten. Dan pada bulan Januari 2017, 5 SPPR ini bersepakat untuk

melakukan advokasi ke pemerintah kabupaten bantul terutama ke Disnakertrans Kabupaten Bantul agar diakui sebagai serikat dan dikeluarkannya Surat Bukti Pencatatan serikat bagi perempuan pekerja rumahan di 5 desa di 3 kecamatan Kabupaten Bantul.

5 SPPR kemudian melakukan audiensi/dialog dengan Disnakertrans Kabupaten Bantul dan pada tanggal 7 Januari 2017 Surat Bukti Pencatatan dikeluarkan oleh Disnakertrans Kabupaten Bantul dan 5 SPPR ini akhirnya diakui dan tercatat sebagai serikat pekerja. Surat Bukti Pencatatan Serikat tadi menjadi dokumen pendukung dalam melakukan advokasi perlindungan hak atas kerja layak bagi PPR (Perempuan Pekerja Rumahan) di 5 SPPR Kabupaten Bantul.

Surat Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Kabupaten Bantul berdampak baik bagi PPR dari 5 serikat untuk melakukan advokasi akses program perlindungan sosial terkait ketenagakerjaan diantaranya SPPR dari 5 Desa yang tergabung dalam federasi SPPR Kabupaten Bantul telah mengakses pelatihan menjahit bagi 1 SPPR dan pelatihan memasak bagi 1 SPPR. Pengurus federasi SPPR Bantul juga dapat terlibat dalam pembahasan program dan kegiatan di Disnakertrans Kabupaten Bantul.

Surat Bukti Pencatatan dari Disnakertrans Kabupaten Bantul ini juga berpengaruh pada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah desa di 5 desa Kabupaten Bantul. Di terbitkannya SK Pengakuan bagi PPR sebagai lembaga/ organisasi di desa yang menjadikan SPPR di desa tersebut dapat terlibat dalam musyawarah di dusun (musdus) dan di

desa yaitu musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa (musrenbangdes). Usulan program dari SPPR di 5 desa tersebut mulai didengarkan dan diperhatikan oleh pemerintah desa dan dimasukkan dalam rencana anggaran pembangunan desa (RAPBDesa) tahun 2019 dst.

Diterbitkannya SK Pengakuan Serikat perempuan pekerja rumahan ini juga dilakukan oleh pemerintah kelurahan di Kota Yogyakarta. Walau Disnakertrans dan UKM kota Yogyakarta belum mengakui keberadaan serikat di 5 kelurahan di kota Yogyakarta, tetapi lurah dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis dan Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta telah menerbitkan SK pencatatan serikat di kelurahannya. Dampaknya adalah pekerja rumahan di 2 kelurahan tersebut dapat mengakses pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh kelurahan, dan dapat mengusulkan program kegiatan serikat di pemerintah kelurahan.

Pengakuan yang telah diberikan dalam bentuk SK ini menjadi payung bagi perempuan pekerja rumahan dalam melakukan advokasi perlindungan hak atas kerja layak dan mengakses program perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan di DIY. Telah berjalannya praktek baik dari pemerintah desa/kel. Kab/kota dan propinsi kepada perempuan pekerja rumahan di DIY terutama pekerja rumahan yang telah tergabung di 10 serikat di DIY maka kami YASANTI memilih pengalaman ini sebagai tema penyusunan dokumen praktek baik dalam melakukan advokasi.

Buku Praktek Baik ini diambil dari wawancara dengan berbagai pihak berjumlah 25 orang yang terlibat aktif dalam advokasi pengakuan dan perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) utamanya terbitnya SK Pengakuan dan Surat Bukti Pencatatan Serikat yaitu dari serikat PPR (9 orang), pemerintah (9 orang), internal YASANTI (3 orang), jaringan pendukung (3 orang) dan pengusaha (1 orang).

Dilampiri dengan foto-foto perjuangan pengakuan dan perlindungan perempuan pekerja rumahan termasuk yang perkembangan terbaru adanya Sarasehan Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Pekerja Rumahan di DPRD DIY 26 November 2018 yang menghasilkan kesepakatan bersama akan mewujudkan Perda Ketenagakerjaan dan Pergub Perlindungan PPR di DIY.

DAFTAR ISI

Pengantar ~ v

Abstraksi ~ ix

Daftar Isi ~ xv

Sambutan-sambutan:

a. Ketua DPRD DIY ~ **xix**

b. Kepala Disnakertrans DIY ~ **xx**

c. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta ~ **xxi**

Wawancara dengan Warisah (Ketua Federasi Serikat
Perempuan Pekerja Rumahan Bantul ~ 1

Wawancara dengan Sri Wahyuni (Ketua Serikat Kreatif Bunda
Desa Wonolelo, Pleret, Bantul) ~ 3

Wawancara dengan Marsi (Ketua SPPR Kasih Bunda
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul) ~ 7

Wawancara dengan Mujiyem (Ketua SPPR Bunda Berkarya
Segoroyoso, Pleret, Bantul) ~ 10

Wawancara dengan Mugi Lestari (Ketua PPR Ngudi Makmur
Wukirsari, Imogiri, Bantul) ~ 13

Wawancara dengan Ginar (Pengurus Bunda Berkarya
Segoroyoso, Pleret, Bantul) ~ 16

Wawancara dengan Nunik (Ketua Serikat Bunda Mandiri
Desa Bawuran, Pleret, Bantul) ~ 18

Wawancara dengan Titin Andayani (Ketua Federasi Serikat
Perempuan Pekerja Rumahan Kota Yogyakarta, Ketua Serikat

Perempuan Pekerja Rumahan Sekar Melati Kelurahan
Cokrodiningratan, Jetis, Bantul) ~ 21

Wawancara dengan Eny Tudyanti (Ketua Serikat Perempuan
Pekerja Rumahan Bunda Mulia Kelurahan Tahunan Kota
Yogyakarta) ~ 23

Wawancara dengan Bapak Angga
Suanggana (Disnaker DIY) ~ 26

Wawancara dengan Bapak Jumakir (Disnakertrans Kabupaten
Bantul) ~ 33

Wawancara dengan Ibu Puji Astuti Sugiyanta (Lurah Desa
Wonolelo Pleret Bantul 2012-2018) ~ 35

Wawancara dengan Bapak Miyadiana (Lurah Desa
Segoroyoso, Pleret, Bantul) ~ 39

Wawancara dengan Bapak Parja, ST MSi (Kepala Desa
Bangunjiwo, Kasihan, Bantul) ~ 41

Wawancara dengan Bapak Harmawan
(Lurah Desa Bawuran) ~ 45

Wawancara dengan Bapak Narotama, S.STP, MSi (Lurah
Cokrodiningratan, Kec Jetis, Kota Yogyakarta) ~ 47

Wawancara dengan Ibu Sugiharti, SIP (Lurah Tahunan, Kec
Umbulharjo, Kota Yogyakarta) ~ 50

Wawancara dengan Ibu Maryanti (Sekretaris Desa Wukirsari,
Imogiri, Bantul) ~ 53

Wawancara dengan Ibu Amin Muftiyanah (Direktur
YASANTI) ~ 55

Wawancara dengan Hikmah Diniah (Tim MAMPU) ~ 57

Wawancara dengan Ibu Martini (Tim YASANTI) ~ 63

Wawancara dengan Gieyanto (Perhimpunan Solidaritas Buruh
/PSB) ~ 65

Wawancara dengan Jumiyeem / Lek Jum (Ketua Serikat Pekerja
Rumah Tangga/ SPRT) ~ 67

Wawancara dengan Tri Wahyu (Indonesian Court Monitoring
/ICM) ~ 69

Wawancara dengan Bapak Risdiyanto dan Ngatini (Juragan
tas batik perca) ~ 72

Penutup ~ 74

Tanda Bukti Pencatatan dari Disnakertrans ~ 78



Sambutan KETUA DPRD DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salam dan sholawat semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, tauladan bagi manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Amien.

Kami, selaku Ketua DPRD DIY, sangat gembira dengan terbitnya buku Praktek Baik Pengakuan Negara Terhadap Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) secara tertulis ini. Tentu dokumen seperti ini akan sangat berarti untuk dapat menjadi referensi bagi pemberdayaan perempuan khususnya perempuan pekerja rumahan.

Kami berharap langkah-langkah nyata yang telah ditorehkan Yayasan Annisa Swasti ini yang merupakan organisasi nirlaba yang telah berdiri sejak tahun 1982 ini agar terus dikembangkan dan diperjuangkan karena apa yang telah dilakukan Yayasan ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan sangat membantu program-program Pemerintah di dalam upaya yang tak pernah berhenti untuk mensejahterakan rakyat.

Harapan kami ke depan agar manajemen dari yayasan ini semakin profesional dan akuntabel sehingga hasilnya akan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya, dan perempuan pekerja rumahan pada khususnya.

Sekian, semoga amal baik Saudara akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Amien

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

10 Desember 2018
Hormat kami,

Yosef Indrayana, S.E.



Sambutan
Kepala Disnakertrans DIY

Assalamualaikum wr wb,

Puji dan syukur sepentasnya selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menunaikan tugas dan dama bakti kita kepada bangsa dan negara

Pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak saja memerlukan peran agresif pemerintah tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat dalam segala bidang. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY menyambut baik keberadaan dan aktivitas Yayasan Anisa Swasti (Yasanti) yang telah berkiprah selama lebih kurang 36 tahun khususnya dalam pemberdayaan perempuan pekerja rumahan. Keberadaan selama beberapa dekade tersebut menunjukkan arti penting Yasanti sekaligus besarnya kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

Beberapa program Yasanti seperti perlindungan pekerja informal maupun perbaikan kondisi kerja adalah sejalan dengan program dan kegiatan Disnakertrans DIY untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan tetap mewujudkan hubungan industrial yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat dimaknai sebagai upaya memarusikan manusia agar semua orang dapat bekerja dengan terlindungi yaitu mendapatkan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Peran serta Yasanti akan mendorong masyarakat khususnya perempuan pekerja rumahan semakin mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain dan pada akhirnya kami berharap Yasanti dapat terus menjaga konsistensinya, terus meningkatkan profesionalitasnya, serta semakin meningkatkan berbagai langkah nyata untuk bersama-sama dengan pemerintah mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sekian, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu berkenan meridhoi

Wassalamualaikum wr wb.

Yogyakarta, Desember 2018

Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Gubernur Istimewa Yogyakarta



ANDONG PRIHADI SANTOSA, M. Kes
NIP. 19600423 198803 1 004

Sambutan
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta

Assalamu'alaikum ww

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas ridho dan perkenannya kita masih diberi kesempatan beraktivitas, Shalawat & salam senantiasa tercurah ke haribaan Nabi Muhammad SAW, terima kasih kami ucapkan pada YASANTI yang selama ini bersama BPJS Ketenagakerjaan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan Perempuan Pekerja Rumahan guna terwujudnya kemandirian perempuan pekerja secara ekonomi & sosial.

BPJS Ketenagakerjaan hadir & eksis dalam rangka memenuhi amanah UU 40/2004 melaksanakan program perlindungan kepada Pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua & Jaminan Pensiun (JKK,JKM,JHT & JP) guna kesejahteraan Pekerja beserta keluarganya, bersama seluruh stakeholder mengajak dan menghimbau agar seluruh Pekerja bisa menjadi peserta & dilindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sinergitas yang telah terbentuk ini diharapkan dapat ditingkatkan sehingga Republik ini menjadi Negara yang makin sejahtera penduduknya didukung Perempuan tangguh yang senantiasa memperjuangkan hak-haknya sekaligus patuh melaksanakan kewajibannya sebagai ibu, Istri, Pekerja & sebagai masyarakat, berikutnya kami ucapkan SELAMAT kepada YASANTI atas Launching buku " Praktek Baik Pengakuan & Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan" semoga bermanfaat bagi seluruh masyarakat khususnya PPR.

Demikian semoga Allah Tuhan YME selalu memberkahi kita, Aamiin Wassalamu'alaikum wr wb

Yogyakarta, 11 Desember 2018

Ainal Kholid
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Warisah (Ketua Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bantul)



Menurut saya berorganisasi itu penting dan banyak manfaatnya diantaranya banyak mendapat pengalaman, menambah pengetahuan dan wawasan serta pemerintah lebih mengenal kita. Saya mulai bergabung di organisasi Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) –Serikat Kreatif Bunda Wonolelo- sejak tahun 2008, dulu belum menjadi Serikat, baru Kelompok dan anggotanya masih sedikit. Dengan berorganisasi kita bisa bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hak-hak kita sebagai Perempuan Pekerja Rumahan (PPR).

Cara kami mengajak teman-teman untuk bergabung di organisasi ini, yaitu kita mendata dan memberi sosialisasi ke teman-teman yang belum bergabung tentang apa itu Perempuan Pekerja Rumahan (PPR), apa hak kita menjadi PPR. Kami memilih bentuk Serikat karena kami semua adalah pekerja dan kalau serikat itu sudah ada Bukti Pencatatan dari Disnakertrans Bantul.

Yang mendukung Serikat kami adalah keluarga, masyarakat, pemerintah, semua SPPR Bantul dan SPPR kota Yogyakarta, LSM/Jaringan (YASANTI, SP Kinasih, LBH, Serikat PRT, Paguyuban Buruh Gendong, ICM, dll)

Advokasi yang sudah kami lakukan yaitu sowan ke pemerintah desa, Disnakertrans Bantul, BLK Bantul, Bappeda Bantul, Bupati Bantul, DPRD Propinsi, Disnakertrans Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, Bappeda Provinsi. Yang terlibat dalam advokasi tersebut adalah kami semua anggota PPR bersama jaringan pendukung yaitu LSM YASANTI, dkk. Proses advokasi yang kami lakukan kami sowan ke Dinas-Dinas terkait untuk mendapatkan hak-hak kami sebagai PPR diantaranya: mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengakuan dari pemerintah desa, mendapatkan Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Bantul, mendapatkan pelatihan-pelatihan, dan menyerahkan data-data ke pemerintah sebagai bahan pendukung advokasi kami.

Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bantul (FSPPRB) berdiri tanggal 15 Mei 2017 dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor: 101/F.SP/BR.3L/XI/2017 Tanggal 27 November 2017. Dampak dari Pencatatan di Disnaker Bantul tadi adalah kami bisa mengakses program pembangunan yang ada di Kabupaten Bantul, selalu dilibatkan dalam musyawarah-musyawarah contoh untuk musyawarah persiapan dan pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day 1 Mei), dan mendapatkan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Disnakertrans Bantul dan BPJS Ketenagakerjaan Bantul.

Wawancara dengan Sri Wahyuni **(Ketua Serikat Kreatif Bunda Desa Wonolelo, Pleret, Bantul)**



Menurut saya organisasi itu ya sangat penting karena berorganisasi kita bisa tambah pengalaman, yang utama itu banyak teman terus dapat pengalaman dari mana-mana, kan kalau berorganisasi itu kan kumpulan yang artinya berkumpul untuk sharing pengalaman dan juga memecahkan masalah misalnya pas tidak punya pekerjaan bisa tanya ke teman yang lain lewat organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan sentra kerjanya sama atau satu sektor kerja yang mempunyai tujuan yang sama.

Manfaat berorganisasi secara pribadi saya bisa lebih percaya diri yang dulunya saya menjadi pembawa acara/MC di perkumpulan PKK saja takut dan malu tapi sekarang setelah berorganisasi sudah percaya diri sudah berani negosiasi sama

juragan berani ikut advokasi kemana-mana (termasuk ke pemerintah). Ada pelatihan kepemimpinan perempuan ,sekolah juga ada dan di suruh praktek ke depan misalnya menjadi pembawa acara/MC praktek satu-satu makanya saya jadi bisa dan berani berbicara seperti sekarang.

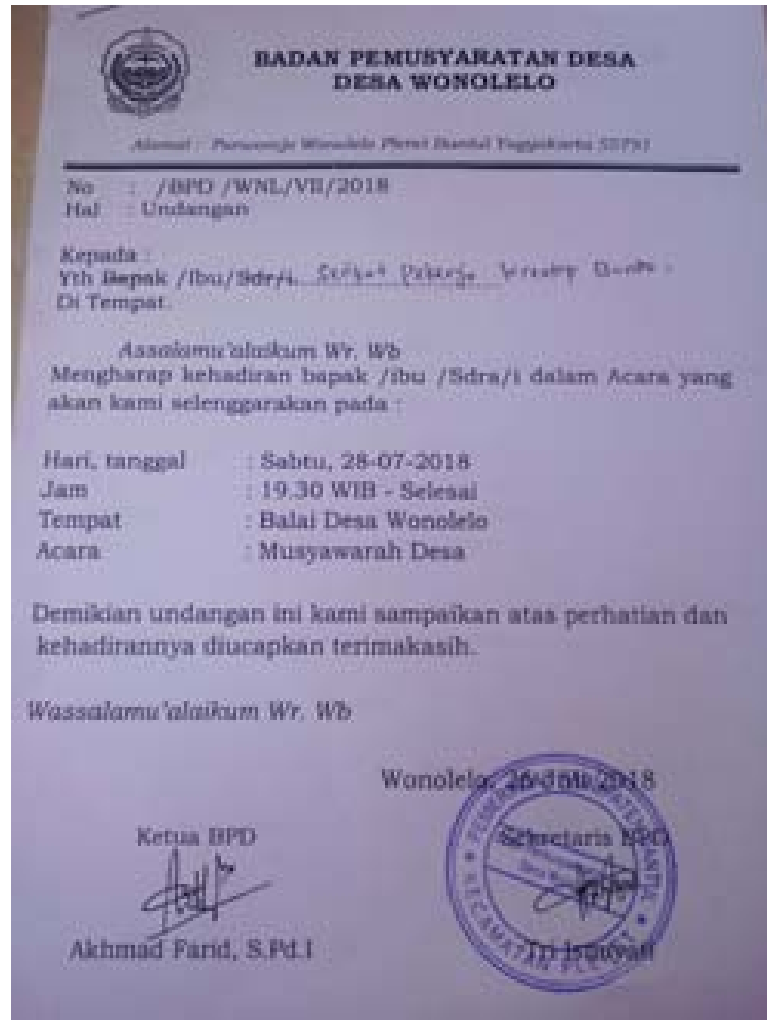
Saya mulai berorganisasi tahun 2008 ,saya ikut di organisasi Kreatif Bunda Bojong Wonolelo Pleret Bantul. Cara membentuk organisasi, kita ini kan perempuan yang banyak bicaranya teman-teman kerja di sektor tas batik perca trus mereka “omong –omong (bicara) kosong” dan disitu sya mengusulkan bagaimana kalau di bentuk suatu organisasi karena pekerjaan kita sama dan pekerjanya itu banyak dan akhirnya ya kita kumpul di suatu tempat untuk membentuk organisasi.

Bentuk organisasi yang dipilih adalah serikat karena sudah ada undang-undangnya (UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh) jadi kalau serikat itu kita bisa mendapatkan Bukti Pencatatan dari Disnaker dan juga SK Pengakuan dari Kelurahan. Yang terlibat dalam pembentukan organisasi serikat Bunda Mandiri misalnya keluarga mendukung seperti suami saya setuju, orang tua saya setuju apalagi dari masyarakat malah Ibu dukuh saya itu ikut bergabung diserikat kreatif Bunda menjadi anggota ,ibu RT kami kebetulan menjadi juragan tas batik perca”.

Advokasi yang pertama kita mendapatkan Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Kabupaten Bantul dan yang kedua SK Pengakuan dari Kelurahan yaitu Pemerintah Desa Wonolelo. Yang terlibat dalam advokasi (yang Bukti Pencatatan

Serikat di Disnakertrans)selain PPR sendiri, ada pendukung yaitu jaringan antara lain : Buruh Gendong, Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB),Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT),dan dari YASANTI juga yang selalu mendukung kami, kalau yang advokasi SK Pengakuan dari Kelurahan ada pengurus Serikat PPR sama dari YASANTI itu terus mendampingi kami. Prosesnya hingga Bukti Pencatatan Serikat terbit,kita sowan ke Disnaker untuk pengajuan Bukti Pencatatan Serikat dan akhirnya dikabulkan,trus yang Lurah saya membawa contoh SK dari Desa Bawuran saya serahkan ke bu Lurah dan mau di pelajari dulu trus kami di suruh pulang dulu karena membuat SK itu tidak sebentar dan kalau sudah jadi mau di hubungi lagi dan tidak berapa lama kita di hubungi kalau SK Pengakuan dari Desa sudah jadi sekitar 1 minggu dari pengajuan.

Bukti Pencatatan dari Disnakertrans di terbitkan yang dari Desa itu diterbitkan pada bulan januari 2017 sedang SK Pengakuan Pemerintah Desa pada bulan Mei 2018. Setelah diterbitkannya Bukti Pencatatan Serikat dan SK Pengakuan, banyak sekali dampaknya diantaranya yang pertama kita mendapatkan pelatihan menjahit dari BLK Kabupaten Bantul untuk 16 orang PPR Serikat Kreatif Bunda Wonolelo,kalau sudah dapat SK dari Desa itu kita banyak peluang yang pertama kita diundang dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan kita juga diundang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wonolelo di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dimana disitu saya bisa mengajukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapasitas di organisasi / serikat saya.



Dok. : Undangan Musyawarah Desa dari BPD Wonolelo untuk SPPR Kreatif Bunda

Wawancara dengan Marsi

(Ketua SPPR Kasih Bunda Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)



Sejak bulan November 2016 kami sudah membentuk organisasi. Dengan adanya organisasi serikat saya dan teman-teman bisa mengakses program yang ada di desa Bangunjiwo dan dengan berorganisasi kita bisa berbagi ilmu dengan sesama teman, bisa *sharing* sehingga tambah pengalaman. Pada awalnya saya mendapatkan undangan dari YASANTI dengan adanya undangan itu, kami berkumpul di tempat pak Dukuh Jipangan dan saya pun mengajak teman-teman untuk ikut dan berkumpul membentuk kelompok supaya kalau ada pelatihan-pelatihan bisa diikutsertakan.

Dengan terbentuknya serikat, itu sudah diakui oleh pemerintah sehingga kalau ada pelatihan-pelatihan, kami bisa mengakses lewat serikat itu. Yang terlibat dalam pembentukan organisasi adalah semua anggota PPR yang berada di Bangunjiwo, Bapak Lurah beserta staf-stafnya, PPR dari Bangunjiwo dan

tidak lupa jaringan pendukung dari YASANTI.

Yang mendukung organisasi, dari keluarga : suami dan anak sangat senang karena bisa menambah pengalaman dari masyarakat. Semua masyarakat di lingkungan sekitar sangat mendukung dengan adanya kelompok atau organisasi ini dengan harapan supaya ibu-ibu pekerja rumahan menjadi lebih maju dan bertambah wawasan. Juragan yang aku minta pekerjaan ini sangatlah mendukung, jadi apabila ada pertemuan ataupun kumpulan kami diberi waktu sepenuhnya untuk berorganisasi dan pekerjaan bisa ditinggalkan.

Dengan adanya organisasi di dusun Jipangan ini bisa menambah pengalaman dan tentunya kalau sudah terbentuk organisasi kami bisa mengakses program-program atau pelatihan baik dari desa maupun dari pemerintah. Jadi selama ini yang sudah dilakukan kelompok kami yaitu sowan ke pemerintah desa dengan tujuan untuk bersosialisasi tentang kelompok yang kami bentuk supaya kalau ada program pelatihan bisa dilibatkan dan supaya bisa diakui keberadaan kami dan mendapatkan SK Pengakuan dari desa dan Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Bantul

Yang terlibat dalam advokasi tersebut adalah kami pekerja rumahan dan didampingi oleh YASANTI. Kami mengusulkan poin-poin yang akan dimasukkan dalam SK. Kalau SK yang dari desa terbit tanggal 1 Desember 2016. Kalau Bukti Pencatatan Serikat yang dari Disnakertrans Bantul Januari 2017. Dampak SK Pengakuan dan Bukti Pencatatan yang sudah dikeluarkan baik dari desa ataupun dari kabupaten, Serikat kami sudah

diakui oleh pemerintah sehingga kami bisa mengakses program-program kegiatan yang ada di pemerintah. Contoh : kami sudah mendapatkan sosialisasi tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sudah memasukkan proposal di desa dan Disnakertrans Bantul, sudah mendapatkan pelatihan sablon dan batik, rencana pelatihan memasak tahun 2019 akan dikabulkan.



Dok. Foto Pelatihan Batik Tulis di Desa Bangunjiwo



Dok. Foto Pelatihan Sablon dan Alat – alatnya di Desa Bangunjiwo

Wawancara dengan Mujiyem

(Ketua SPPR Bunda Berkarya Segoroyoso Pleret Bantul)



Berorganisasi itu penting karena dengan berorganisasi kami bisa berkumpul, sharing pengalaman berbagi pekerjaan serta berbagi cerita sehingga sangatlah bermanfaat bagi kami semuanya. Di Segoroyoso ini untuk berorganisasi sudah sejak lama misalnya : kelompok PKK, kelompok dasa wisma, sedangkan khusus untuk yang kelompok buruh rumahan mulai Agustus 2016. Cara membentuk dan mengajak orang untuk berorganisasi yaitu sebelumnya saya datang dari rumah ke rumah untuk diajak berkumpul dan diberikan sedikit wawasan arti pentingnya berorganisasi dengan demikian para buruh/pekerja rumahan paham dan mengerti pentingnya berorganisasi. Memilih bentuk organisasi serikat karena kalau serikat sudah diakui pemerintah. Sehingga kami bisa mengakses program-program yang ada di pemerintahan.

Manfaat berorganisasi yaitu bisa mengakses program yang ada di Pemerintah Desa maupun Kabupaten dan Propinsi. Kami PPR Segoroyoso dengan terbentuknya kelompok organisasi, sekarang sudah bisa mengembangkan usaha kelompok yaitu “krupuk joss” dengan adanya usaha itu bisa menambah kas dan pendapatan kelompok.



Dok. : Krupuk Joss produk hasil dari SPPR Segoroyoso

Yang terlibat dalam pembentukan organisasi, semua anggota PPR yang berada di Segoroyoso, Bapak Lurah beserta staf-stafnya, PPR dari Segoroyoso, Wukirsari dan Bawuran dan tidak lupa dari YASANTI. Yang mendukung organisasi yang berada di Segoroyoso ini, dari keluarga yaitu seluruh anggota keluarga. Dari masyarakat seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari juragan sangat mendukung dengan adanya kelompok pekerja rumahan ini, dan memberi kebebasan untuk berorganisasi.

Advokasi yang sudah dilakukan yaitu dari sowan-sowan ke Pak Dukuh kemudian ke Kelurahan dengan tujuan untuk memperkenalkan adanya pekerja rumahan dengan demikian supaya diperhatikan oleh Pemerintah Desa dan segera mendapatkan SK. Yang terlibat dalam advokasi tersebut adalah kami pekerja rumahan Segoroyoso dan tim YASANTI. Proses advokasinya, kami PPR mengusulkan poin-poin apa saja yang dianggap bermanfaat untuk PPR. SK Pengakuan dari desa Segoroyoso terbit tanggal 15 Januari 2018 dan Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Bantul Januari 2017

Dampak SK Pengakuan yang sudah dikeluarkan, dari desa : kami pekerja rumahan bisa mengajukan proposal pelatihan dan kami juga bisa mengakses pelatihan-pelatihan atau program lain untuk PPR kami. Dari kabupaten, kami juga sudah dapat mengajukan proposal dan sudah mendapatkan pelatihan K3 dari Bantul, juga bisa mengakses program-program apapun yang berguna untuk PPR.

Wawancara dengan Mugi Lestari (Ketua PPR Ngudi Makmur Wukirsari Imogiri Bantul)



Organisasi penting karena dengan berorganisasi itu kita bisa bertukar pengalaman, berbagi cerita, silaturahmi dan berbagi ilmu dan lain-lain. Kalau untuk berorganisasi itu sudah lama misalnya ikut PKK, dasa wisma, arisan kelompok RT, dll. Tapi kalau di serikat pekerja rumahan sejak tanggal 16 November 2016. Caranya membentuk dan mengajak orang untuk berorganisasi yaitu kita memberikan informasi kepada pekerja rumahan atau calon-calon anggota. Jadi kita juga datang rumah-rumah yang bekerja di rumah kita diajak untuk berkumpul.

Memilih bentuk organisasi serikat karena organisasi serikat sudah diakui oleh pemerintah sehingga kita bisa mengajukan proposal dan setelah diakui kita bisa mengakses kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di Pemerintah

Desa, Kabupaten maupun Provinsi. Yang terlibat dalam pembentukan organisasi yaitu dari teman-teman anggota pekerja rumahan Wukirsari, Tim YASANTI, Pak Dukuh, Staf Balai Desa Wukirsari dan teman-teman PPR desa lain. Manfaat berorganisasi ya kita senang ya, bisa berbagi pengalaman dan bisa mengakses program-program dari pemerintah dan bisa mengajukan proposal untuk kelompok. Misalnya : memasak, menjahit, dll.

Yang mendukung organisasi yang berada di Wukirsari ini, dari keluarga yaitu semua anggota keluarga dan keluarga besarku. Dari masyarakat, semua masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya serta Pak Dukuh dan Bapak RT dan Staf Balai Desa. Dari juragan sangat mendukung jadi apabila kami pas ada pertemuan dan pada saat itu harus mengembalikan pekerjaan maka juragan memberikan tambahan waktu atau hari berikutnya.

Advokasi yang sudah dilakukan yaitu kita melakukan sowan-sowan ke pemerintah desa dan kabupaten untuk mendapatkan SK, dengan demikian kami PPR bisa silaturahmi dan akrab dengan staf/ pamong desa serta pemerintah di kabupaten. Yang terlibat dalam advokasi yaitu PPR dan didampingi oleh YASANTI serta PPR dari desa lain. Proses advokasinya, kita mengusulkan poin-poin yang akan dimasukkan dalam SK tersebut. Jadi apa yang dirasa PPR itu penting dan bermanfaat sehingga dengan adanya SK, keberadaan PPR diakui dan semakin kuat. SK dari desa Wukirsari dikeluarkan tanggal 16 Januari 2018 dan dari Disnakertrans Bantul Januari 2017.

Dampak SK yang sudah dikeluarkan, dari desa yaitu kami PPR bisa mengajukan proposal-proposal dengan didanai dana desa. Bisa mengakses pelatihan-pelatihan ataupun sosialisasi. Misalnya kemarin, sosialisasi K3. Berharap bisa diikutsertakan dalam Musrenbangdes. Dari kabupaten, bisa mengakses program-program pelatihan dan kegiatan yang diadakan di Disnakertrans Bantul, misalnya: K-3, dilibatkan menjadi panitia MAYDAY, sudah diakui keberadaannya di Kabupaten Bantul

Wawancara dengan Ginar

(Pengurus Bunda Berkarya Segoroyoso, Pleret, Bantul)



Berorgansiasi itu penting karena dengan berorganisasi itu kita bisa banyak teman, bertambah wawasan, bisa sharing dan tentunya banyak pengalaman serta bisa berjejaring. Mulai berorganisasi kalau untuk kelompok pekerja rumahan mulai September 2016. Caranya membentuk dan mengajak orang untuk berorganisasi awalnya datang ke rumah-rumah untuk ikut kumpul-kumpul dan dengan bertemu teman-teman kita bisa saling bercerita, bertukar pengalaman, tukar pekerjaan sehingga sangatlah berguna dengan adanya kelompok/ organisasi.

Manfaat berorganisasi, dengan berorganisasi serikat kita bisa mengakses program-program yang ada di pemerintah serta kita bisa mengajukan proposal pelatihan baik di pemerintah desa maupun kabupaten.

Memilih bentuk organisasi serikat karena kami pekerja rumahan maka bentuk organisasi serikatlah yang pas untuk pekerja rumahan, dimana serikat itu sudah diakui oleh

pemerintah sehingga pekerja rumahan bisa diperhatikan keberadaannya. Yang terlibat dalam pembentukan organisasi yaitu Semua anggota PPR desa Segoroyoso, PPR dari desa lain, YASANTI, kepala desa, Staf desa Segoroyoso dan Bapak RT 02 Srumbung, Segoroyoso. Yang mendukung organisasi yang berada di Segoroyoso ini dari keluarga, Bapak Lurah, Bapak RT, juragan, masyarakat, PPR dari desa lain dan YASANTI.

Advokasi yang sudah dilakukan antara lain sowan ke Pemerintah Desa untuk mendapatkan SK Pengakuan PPR dari desa dan sowan ke Disnakertrans Bantul untuk dicatat dan mendapatkan Bukti Pencatatan dari Dinas Ketenagakerjaan Bantul. Yang terlibat dalam advokasi tersebut adalah PPR Bantul dan YASANTI dkk. Proses advokasinya yaitu kami PPR mengusulkan poin-poin yang akan dimasukkan dalam SK dan setelah beberapa bulan baru keluar SK. Untuk yang SK Pengakuan dari desa 15 Januari 2018 dan Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Bantul Januari 2017.

Dampak SK yang sudah dikeluarkan baik dari desa maupun dari kabupaten yaitu dari desa : kami bisa mengakses program-program yang ada di desa dan sudah mengajukan proposal pelatihan untuk PPR Segoroyoso. Dari kabupaten, kami sudah bisa mengakses program-program pelatihan yang ada di kabupaten. Misalnya : kami sudah dapat pelatihan memasak selama 28 hari, dengan demikian kami sangat berterima kasih dengan terkabulnya pengajuan proposal kami.

Wawancara dengan Nunik Kristiana (Ketua Serikat Bunda Mandiri Desa Bawuran, Pleret, Bantul)



Menurut saya berorganisasi itu penting karena berorganisasi bisa untuk mengakses program-program dari pemerintah ,dengan berorganisasi bisa lebih kuat dan lebih baik, organisasi adalah perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama. Saya mulai berorganisasi tahun 2015, saya ikut di organisasi di desa lain dulunya di dusun bojong kreatif bunda, desa wonolelo pleret. Saya membentuk organisasi di Desa Bawuran ini dengan mengajak teman-teman pekerja rumahan ada yang jahit, ada yang menganyam eblek ,ada yang merajut, mereka saya ajak untuk arisan ada 28 orang yang ikut dan itu dengan satu tujuan yaitu mengakses program dari pemerintah dan untuk memperkuat organisasi.

Bentuk organisasi yang kami pilih adalah serikat, saya rasa kalau serikat itu karena sudah ada undang-undangnya (UU 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) jadi kita berharap bisa lebih kuat. Yang terlibat dalam pembentukan organisasi serikat Bunda Mandiri, keluarga mendukung seperti suami saya karena dulunya juga pernah mempunyai organisasi serikat,dari juragan juga membolehkan dari masyarakat dari pak RT sudah mengetahui kalau kita itu sudah membentuk organisasi. Manfaat yang saya rasakan setelah berorganisasi, secara pribadi saya mendapatkan ilmu dari pelatihan-pelatihan ,banyak teman juga advokasi ke juragan lebih gampang juga ke pemerintah.

Advokasi yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans atau SK Pengakuan dari kelurahan/desa dengan cara pengurus PPR Sowan ke Disnakertrans Bantul dan akhirnya di terbitkan Bukti Pencatatan Serikat untuk PPR,dan yang untuk SK Pengakuan dari Desa saya punya contoh SK Pengakuan PPR yang dari Desa Bangunjiwo (Kasih, Bantul) dan saya bilang ke pak Lurah Bawuran kalau di Bangunjiwo sudah di terbitkan SK Pengakuan buat PPR Bangunjiwo ,Bapak Lurah saya langsung acc dan menyetujui untuk menerbitkan SK buat Serikat kami Bunda Mandiri,karena lurah Bangunjiwo dan Bawuran itu sepaham (mendukung perjuangan PPR) jadi lebih mudah PPR mengajukan SK Pengakuan.

Yang terlibat dalam advokasi baik Bukti Pencatatan yang di Disnakertrans maupun yang SK Pengakuan dari kelurahan/desa

misalnya jaringan ada dari YASANTI itu selalu mendukung dan dari jaringan ada dari SPRT, PSB dan Buruh Gendong yang selalu mendukung kami, kalau yang advokasi SK Pengakuan dari Kelurahan ada pengurus PPR sama dari YASANTI itu terus mendampingi kami. Prosesnya menurut saya sangat gampang apalagi yang SK Pengakuan dari kelurahan karena lurah kami sudah akrab dengan Lurah Bangunjiwo dan saya menunjukan SK yang dari Bangunjiwo dan Lurah kami langsung menyetujui untuk menerbitkan SK buat kami. Kalau yang dari Desa itu diterbitkan tanggal 30 November 2017 dan yang Bukti Pencatatan Serikat dari Disnaker itu bulan Januari 2017. Setelah diterbitkannya SK Pengakuan, dari desa ada pelatihan memasak kue kering, kalau dari Disnaker kita pernah ada pelatihan K3 dan pelatihan yang lain tapi itu giliran dengan serikat yang lain.

Wawancara dengan Titin Andayani

(Ketua Federasi Serikat Perempuan Pekerja Rumahan /SPPR Kota Yogyakarta, Ketua SPPR Sekar Melati Kelurahan Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta)



Berorganisasi itu sangat penting karena dengan berorganisasi, pemerintah akan lebih mudah mengenal kelompok kita, menambah saudara, teman, menambah wawasan dan juga menambah ilmu. Saya mulai berorganisasi sejak Serikat Perempuan Pekerja Perempuan Sekar Melati (SPPR SM) dibentuk, yaitu tanggal 22 Oktober 2017. Kalau ikut organisasi yang lain sudah lama sejak menikah sampai sekarang. Dengan bimbingan dan dampingan dari YASANTI kemudian mengajak teman-teman yang bekerja sebagai penggulung sosis menjadi anggota di SPPR SM.

Dengan berserikat kita dapat menyatukan visi dan misi kita untuk sama-sama berjuang demi mendapat hak-hak kita khususnya sebagai Pekerja Rumahan, berjuang bersama YASANTI, teman-teman, dan keluarga. Yang mendukung

organisasi ada dari keluarga yaitu suami dan anak-anak. Masyarakat antara lain Bapak RT, Bapak RW, dan Pak Lurah serta tetangga.

Advokasi yang sudah dilakukan yaitu sowan ke Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Disnakertrans Provinsi, DPRD Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi dan ke Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DIY. Yang terlibat adalah teman-teman sesama Pekerja Rumahan. Kita sowan dan alhamdulillah selama ini selalu diterima dengan tangan terbuka dan mereka (Dinas-dinas terkait) berusaha memahami apa itu Perempuan Pekerja Rumahan dan berjanji akan memberikan program-programnya dan sudah ada program yang terealisasi.



Untuk Bukti Pencatatan Serikat dari Disnakertrans Kota Yogya selama ini belum dapat, tetapi kalau Surat Keputusan (SK) Pengakuan dari Kelurahan Cokrodingratan kita sudah ditetapkan tanggal 27 Oktober 2017. Dampak dengan ada Surat Keputusan kita sudah mulai dikenal pemerintah kelurahan. Kita lebih mudah bisa mengakses program dari pemerintah.

Wawancara dengan Eny Tudiyantri

(Ketua Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mulia Kelurahan Tahunan Kota Yogyakarta)



Menurut saya organisasi itu sangat penting, karena dengan berorganisasi bisa memperluas wawasan, serta dengan berorganisasi tujuan kita mudah tercapai dan pemerintah mudah mengenal kelompok kita. Manfaat berorganisasi menambah saudara, teman, menambah wawasan dan juga menambah ilmu. Saya mulai berorganisasi khususnya Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mulia (SPPR BM) sejak tanggal 11 Oktober 2017 tapi kalau untuk organisasi yang lain sebelumnya saya mengikuti PKK yang ada di wilayah saya. Jadi 11 Oktober 2017 itu pembentukan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mulia (SPPR BM) di Kelurahan Tahunan.

Saya mengajak teman-teman itu dengan komunitas yang sama sebagai Pekerja Rumahan di sekitar saya dan di dampingi YASANTI. Dan dengan bimbingan YASANTI saya bisa mengumpulkan teman-teman yang senasib dengan saya

untuk bergabung. Ada sektor lain dikelompok kami yaitu Batik Jumputan, membuat assesories dan menjahit. Karena dengan organisasi dalam hal ini serikat, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan dan kita lebih mudah untuk memperjuangkan hak-hak kita secara bersama-sama.

Yang mendukung organisasi kami yaitu teman-teman Serikat Pekerja Rumahan dan jaringan pendukung, yaitu YASANTI, dkk. Untuk organisasi kami sudah melakukan advokasi yaitu sowan ke RT, RW, Kelurahan, Disnakertrans Provinsi, DPRD Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi, IWAPI. Kalau ke RT, RW kita mensosialisasikan apa itu Perempuan Pekerja Rumahan.

Yang terlibat dalam advokasi yaitu teman-teman sesama Pekerja Rumahan. Proses Advokasi yang kita lakukan yaitu kita sowan-sowan ke Pemerintah dan alhamdulillah kita diterima dengan baik. Misalnya sowan ke kelurahan alhamdulillah kita sudah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan.

Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mulia (SPPR BM) mendapatkan Surat Keputusan (SK) Pengakuan dari Kelurahan Tahunan tanggal 4 September 2018. Surat Keputusan kita ini baru dan semoga Serikat Perempuan Pekerja Rumahan yang belum mendapatkan Surat Keputusan segera mendapatkan.

Dampak dari Surat Keputusan (SK) yang di keluarkan dari Kelurahan Tahunan alhamdulillah dengan adanya Surat Keputusan (SK) kita lebih mantap, lebih senang, sudah legal dan diakui oleh Kelurahan. Kedepannya insyaallah kita bisa

mengakses program-program dari kelurahan dan dilibatkan didalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat RW/Kampung dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (musrenbangkel).

Wawancara dengan Bapak Angga Suanggana (Disnakertrans DIY)



Secara umum suatu kemajuan menunjukkan kepedulian dari desa kepada warga desanya dalam hal ini yang bekerja sebagai Perempuan Pekerja Rumahan (PPR). SK dasar kepala desa memasukkan dalam program desa. Suatu terobosan, patut diapresiasi. SK jadi dasar, landasan bagi kepala desa dan aparat desa untuk menggunakan anggaran desa untuk kemajuan warganya dalam hal ini PPR di desanya. Juga merupakan pengakuan bahwa PPR ada dan nyata, hidup dan melakukan aktivitas ekonomi di desa. Kalau dikaitkan pembangunan ekonomi desa cukup berpengaruh terkait perekonomian pembangunan desa. Bisa dicontoh kepala-kepala desa yang lain.

Pekerja Rumahan satu isu mendasar adalah soal isu ketersembunyian atau tertutupan sebagaimana hasil penelitian *International Labour Organization* (ILO/Organisasi Buruh Internasional), dll, karena tersebar di desa-desa atau wilayah yang tidak terjangkau publik. Tentang pendataan, pemerintah desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan warga, mestinya paling efisien dan efektif dalam melakukan pendataan.

Pemerintah desa gunakan data untuk memetakan warganya, sehingga bisa bunyi “ada warga yang bekerja sebagai PPR”. Data BPS, baru data terkait pekerja informal dan PPR belum terlihat dalam data tersebut. Munculkan data PPR dari desa, suatu terobosan. Dan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah di atasnya mulai kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah nasional/pusat sehingga eksistensi PPR terlihat dan diakui. Pendataan resmi atau statistik resmi yang dimiliki tingkat pemerintahan. Mulai dari kumpulan data dan diolah serta dianalisa untuk digunakan dalam penentuan kebijakan baik program kegiatan maupun peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa sifatnya sangat krusial khususnya pencatatan, pendataan sebagai langkah awal penentuan kebijakan secara struktural dalam suatu organisasi pemerintahan. SK Pengakuan PPR dari Desa/Kelurahan merupakan kebijakan yang bersifat konkrit dan individual, bunyi nama dan alamatnya, sudah bisa dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Peran saya selama ini dalam dorongan pengakuan dan perlindungan PPR setidaknya ada 2 (dua) peran yang bisa saya sampaikan. Pertama, sebagai individu manusia biasa. Saya mendapat amanah dari Pemda DIY untuk sekolah pasca sarjana (S2). Beberapa saat sebelum S2, saya mulai akrab dengan isu Pekerja Rumahan. Tepatnya akhir tahun 2014 dan mulai intensif awal tahun 2015. Muncul ketertarikan. Pekerja Rumahan isu yang jarang bahkan jarang sekali saya dengar, suatu hal yang sangat menarik. Upah, pekerja *outsourcing* (alih daya), buruh gendong dan pekerja rumah tangga itu isu-isu yang sudah cukup matang terkait perburuhan/ketenagakerjaan. Saya

tertarik untuk mendekati, mengkaji kemudian saya teliti dan saya kaji lebih mendalam di tesis S2 Hukum saya khususnya aspek perlindungan PPR. Selama saya sekolah S2 (2,5 tahun) saya terus intensif ikuti perkembangan pekerja rumahan. Saya renungkan dalam bentuk formula rumusan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan. Sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai ilmuwan/intelektual yang punya tanggung jawab sosial. Saya tuangkan dalam tesis S2 saya, harapan saya, saya tuangkan berbagai pemikiran dan ide terkait perlindungan hukum pekerja rumahan secara komprehensif tidak hanya bagi pekerja rumahan saja. Hukum esensinya adalah keadilan, tidak hanya bagi satu pihak saja tapi juga proporsional/seimbang bagi pihak-pihak lain. Memang dalam hal ini pekerja rumahan itu memiliki kedudukan hukum yang lebih rentan dan lemah sehingga kecenderungan-kecenderungan dalam tesis saya lebih cenderung ke pekerja rumahan. Wajar, karena posisi dan kedudukan pekerja rumahan lebih rentan/lebih lemah dibanding pihak-pihak lainnya. Saya cenderung berikan perhatian lebih pada pekerja rumahan agar tercipta keseimbangan. Dengan ada perlindungan hukum, kedudukan bisa lebih setara. Ide-ide dalam tesis harapan pribadi saya agar tercipta keadilan dalam tataran kehidupan masyarakat. Tesis ini mendapat tanggapan positif dari tim penguji. Dipandang sebagai ide bagus, kalau bisa diwujudkan akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Berbagai ide tesis sudah saya lakukan baik di internal pemda rekan kerja maupun kepada YASANTI, kawan-kawan pekerja rumahan, bahkan sampai ke Tim MAMPU, ILO juga ke Kemenaker. Harapannya ide-ide saya dalam tesis bisa menjadi

pertimbangan. Akan sangat membahagiakan kalau bisa untuk pertimbangan pengambilan kebijakan baik tingkat struktural maupun di luar struktural pemerintahan. Sebagai intelektual/ilmuwan berpartisipasi mewujudkan upaya kongkrit perwujudan empati/kepedulian bagi pekerja rumahan.

Peran kedua, secara status saya sebagai birokrat/ASN. Secara formal, setiap ada aktivitas kedinasan terkait pekerja rumahan, saya ikuti dan saya “kawal” sebagai utusan/perwakilan resmi dinas. Sejak akhir 2014 awal 2015 mewakili pemda sampai dengan sekarang, dengan ikuti dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas terkait pekerja rumahan baik yang diadakan pemerintah juga organisasi di luar pemerintah. Saya dan rekan-rekan di pemda banyak berdiskusi dan berdialog tentang pekerja rumahan. Setelah diskusi terkait pekerja rumahan awal 2015, lanjut saya bawa ke rekan-rekan lain di pemda. Mulai awal 2015 lebih intensif dengan dialog dan diskusi terkait pekerja rumahan sampai pada akhirnya pada semester 1 tahun 2017 pemda di dimotori bappeda berinisiatif lakukan kajian resmi teliti dan kaji aspek yuridis, filosofis, sosiologis, ekonomis dan sosial budaya pekerja rumahan di DIY. Saya termasuk dalam tim kajian itu awalnya diinisiasi Bappeda kemudian oleh Biro Kesra. Disnaker sebagai *leading sector* mempunyai peran cukup aktif.

Hasil kajian dan rekomendasi, ada temuan yang cukup menonjol adalah di DIY isu pekerja rumahan yang mendominasi adalah aspek sosial kulturalnya. Hubungan/pola yang ada dari isu pekerja rumahan adalah menonjol aspek sosial kulturalnya. Sehingga pendekatannya jangan sampai lepaskan dari

pendekatan sosial kultural. Artinya kalau pemda diy membuat kebijakan terkait isu pekerja rumahan, mesti perhatikan aspek sosial kulturalnya khususnya dalam masyarakat yang berinteraksi/berhubungan langsung dengan pekerja rumahan. Tim kajian memberi masukan pengambilan kebijakan terkait isu pekerja rumahan harus ekstra hati-hati. Artinya perlu ada kajian lebih lanjut/penelitian lebih lanjut agar kebijakan yang diambil tetap pertahankan status kondisi sosial kultural tetap kondusif apalagi DIY kental nuansa kulturalnya. Di luar itu pemda DIY juga sudah akomodasi kebutuhan-kebutuhan kebijakan pekerja rumahan dengan program dan kegiatan di pemda. Kongkritnya misal dari Disnaker, sejak tahun 2016, 2017, bahkan sampai 2018, program dan kegiatan disnaker DIY ada yang ditujukan langsung khusus bagi pekerja rumahan misalnya: pemeriksaan kesehatan bagi pekerja usaha mikro dan kecil sasarannya pekerja rumahan. Pelatihan K3 ditujukan bagi pekerja rumahan. Bimbingan teknis norma kerja perempuan dan anak juga melibatkan pekerja rumahan.



Dok. Foto Kegiatan Federasi SPPR DIY terlibat dalam BIMTEK Norma Kerja Perempuan dan Anak di DIY April 2018

Saya kurang tahu di dinas atau organisasi perangkat daerah lain. Isu pekerja rumahan ini jelas sudah sampai di Dinsos, BPPM, Dinas Perindustrian, UMKM, dll hanya apa sudah masuk dalam program dan kegiatan saya belum tahu secara pasti.

Ke depannya memang isu pekerja rumahan ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan pemda apalagi bicara gender dalam hal ini Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Sudah masuk di PUG di Disnaker mengingat pekerja rumahan memang sebagian besar adalah perempuan. Ke depan juga jadi perhatian dinas dan pemda dan ada kajian serta penelitian lebih lanjut, berdasarkan *grand design* Pemda, rencananya akan dilakukan di tahun 2020.

Terkait praktek baik akan sangat klop / nyambung kalau setelah ada SK Pengakuan dari pemerintah desa kemudian ada pendataan pekerja rumahan dari desa, pasti akan sangat berpengaruh dan bisa sekali dipakai sebagai bahan materi/kajian lebih lanjut di 2020 tadi. Isu pekerja rumahan apabila dibandingkan dengan isu ketenagakerjaan lain memang belum semenonjol isu ketenagakerjaan lain, sehingga mungkin perhatian birokrasi belum sebesar isu lain yang sudah menonjol. Kami sangat tertarik isu upah minimum sektoral (di DIY belum, di provinsi lain sudah) menjadi perhatian bagi pemda. Isu pekerja rumahan belum atau tidak terlalu menonjol, sudah mulai ada perhatian dari pemda tapi belum seintensif isu-isu lain yang sudah menonjol. Saya selalu berupaya untuk tetap menyuarakan dengan ajak diskusi, ngobrol, sharing / bertukar pikiran dengan rekan-rekan lain di birokrasi. Tentunya dengan

proses yang butuh waktu, proses yang halus. Karena bagi rekan-rekan saya di birokrasi, isu ini relatif belum menjadi perhatian mereka. Ketika saya mencoba mencuri perhatian mereka dengan isu pekerja rumahan, butuh ekstra waktu. Suatu komitmen dan tanggung jawab moral saya sebagai seorang birokrat untuk menyuarakan ini kepada internal birokrat rekan saya supaya isu pekerja rumahan ini bisa menjadi perhatian minimal jangan ditinggalkan.

Dengan adanya partisipasi atau keterlibatan dari organisasi di luar pemerintah yang seringkali mengajak kami di pemerintahan, itu sangat efektif untuk terus “mencuri perhatian” pemerintah. Sekali lagi ini proses dan kami berkomitmen untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap pekerja rumahan.

Wawancara dengan Bapak Jumakir (Disnakertrans Kabupaten Bantul)



Bentuk pengakuan yang sudah diterbitkan oleh Disnakertrans Kabupaten Bantul untuk PPR, yaitu PPR mencatatkan ke Disnakertrans Kabupaten Bantul. Ada 5 serikat dan 1 Federasi tetapi bentuknya bukan SK, melainkan Bukti Pencatatan Kelompok Serikat yang sudah diakui oleh Disnakertrans Bantul.

Disnakertrans Kabupaten Bantul bersedia menerbitkan Bukti Pencatatan untuk PPR, karena membentuk serikat itu ada dalam undang-undang (UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh) dan siapapun boleh membuat serikat yang penting bisa memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam UU Serikat Pekerja.

Bukti Pencatatan itu diterbitkan tanggal 16 Januari 2017 untuk 5 serikat PPR, yaitu: Kreatif Bunda, Bunda Mandiri, Ngudi Makmur, Bunda Berkarya, Kasih Bunda, dan Federasi SPPR tanggal 27 November 2017.



Dok. : Penyerahan Surat Bukti Pencatatan Serikat PPR dari Disnaker ke Federasi SPPR Bantul

Poin-poin penting yang ada dalam Bukti Pencatatan tersebut yaitu poin-poinnya dari serikat mengajukan permohonan ke Disnaker untuk dicatat sebagai pekerja (ada pengurus dan anggotanya ada AD ART nya sudah memenuhi persyaratan di UU Serikat Pekerja) maka kami catat dan sekretariatnya ada dan kegiatannya juga ada sampai sekarang masih eksis. Dalam surat bukti pencatatan yang penting kelompok benar-benar ada dan memenuhi syarat silahkan mengajukan dan akan kita verifikasi “jika ada kegiatan yang berhubungan dengan serikat akan dilibatkan “

Bentuk perlindungan yang dikeluarkan setelah Bukti Pencatatan Serikat diterbitkan oleh Disnaker misalnya program ,kegiatan dan dukungan yang lain yaitu pada waktu minta pelatihan BLK dari Disnaker itu *ngaruhke* ke BLK sebagai bentuk dukungan kepada PPR, kalau ada kegiatan di dinas PPR dilibatkan misalnya dalam kegiatan *May Day*, boleh memakai ruangan di Dinas untuk pertemuan PPR.

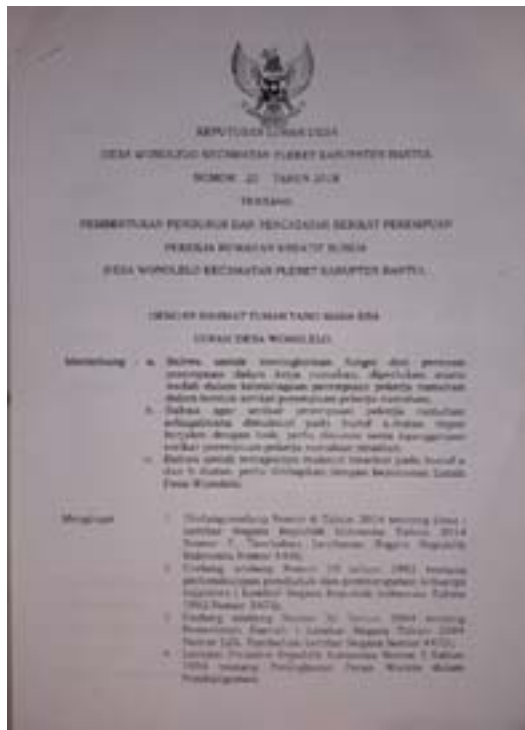
Wawancara dengan Ibu Puji Astuti Sugiyanta (Lurah Desa Wonolelo Pleret Bantul 2012-2018)

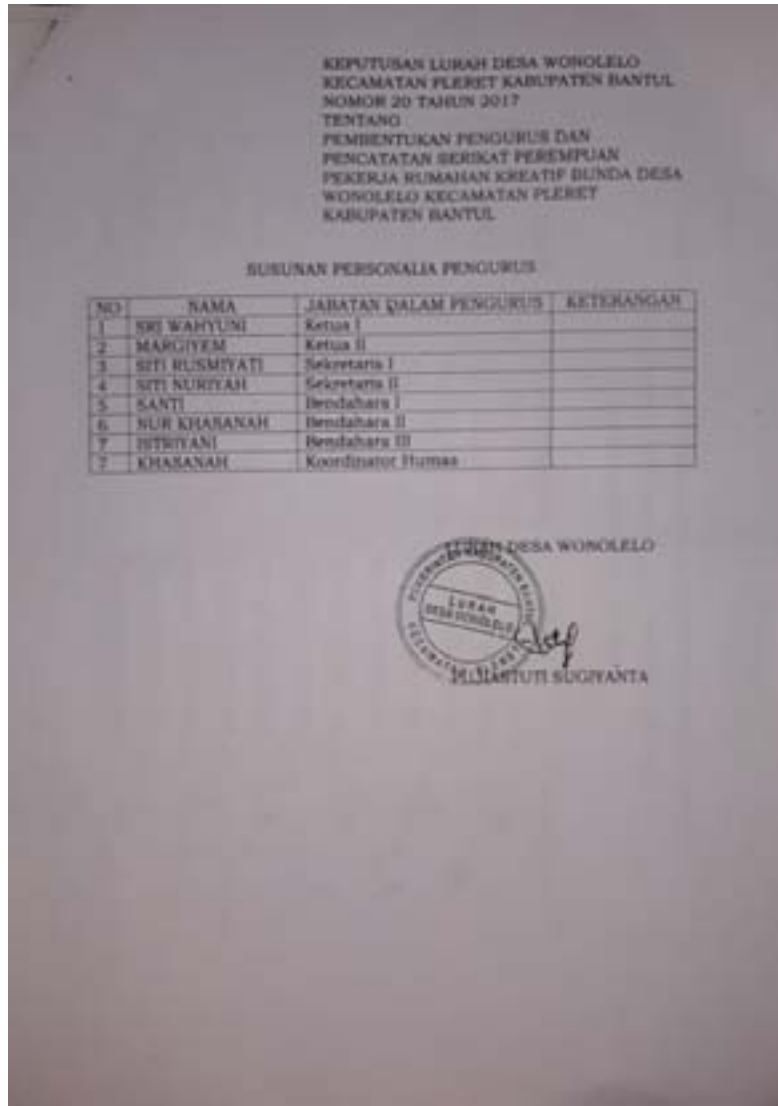


Bentuk pengakuan yang sudah diterbitkan oleh desa Wonolelo untuk PPR adalah SK Pengakuan PPR dari Kepala Desa Wonolelo. Saya bersedia menerbitkan SK untuk PPR di Desa Wonolelo, karena kelompok PPR di Desa Wonolelo itu benar-benar ada dan menjalankan pertemuan rutin setiap Minggu Pon. Jadi tidak salah kalau saya menerbitkan SK Pengakuan Serikat PPR Kreatif Bunda Desa Wonolelo. SK saya terbitkan bulan Januari 2018. Saya ingat SK garis besarnya, yang pertama Serikat Kreatif Bunda dinyatakan sah sebagai kelompok perempuan yang bergerak untuk pemberdayaan terhadap perempuan pekerja rumahan dan keluarganya, yang kedua dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan program kerja dalam serikat perempuan pekerja rumahan Kreatif Bunda, yang ketiga dapat terlibat dalam musyawarah penyusunan program pembangunan Desa Wonolelo, itu poin-poin yang ada dalam SK. Poin-poin tersebut ditulis dan dimasukkan dalam SK,

karena Serikat Kreatif Bunda Desa Wonolelo itu benar-benar riil dan dari Pihak Desa baru bisa memfasilitasi seperti itu.

Bentuk perlindungan yang dikeluarkan setelah SK Pengakuan PPR diterbitkan oleh pemerintah desa adalah dalam bentuk program, kegiatan, dan dukungan lain, yaitu bisa ikut dalam perencanaan pembangunan dari tingkat dusun hingga desa serta mengawal program dari tingkat dusun hingga desa. Dan dengan adanya SK yang sudah diakui oleh Pemerintah Desa, Kreatif Bunda bisa menggunakan fasilitas yang ada di balai desa untuk pertemuan-pertemuan PPR.





Dok.: SK Pengakuan dan Pencatatan SPPR dari Pemerintah Desa Wonolelo, Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY.

Wawancara dengan Bapak Miyadiana (Lurah Desa Segoroyoso, Pleret, Bantul)



Bentuk pengakuan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Segoroyoso untuk PPR adalah SK Kepala Desa Segoroyoso Tahun 2108. PPR dapat berperan serta dalam setiap kegiatan di Desa Segoroyoso. Saya bersedia menerbitkan SK untuk PPR di Desa Segoroyoso, karena anggota Kelompok PPR di Desa Segoroyoso sangat antusias, secara nyata memiliki anggota dan kegiatan di Segoroyoso. Pengakuan PPR dari Pemerintah Desa Segoroyoso untuk serikat tersebut agar serikat bisa berkarya. SK saya terbitkan bulan Januari 2018.

Seingat saya untuk poin-poin dalam SK adalah mengadakan kegiatan, untuk kegiatan di dalam dokumen APBDES berupa pelatihan atau kegiatan apa pun yang jelas keterkaitannya dengan Pemerintah Desa, yang nantinya kegiatan tersebut

dalam kapasitas kebutuhan tingkat desa. Poin-poin tersebut penting ditulis karena itu potensi yang ada di tempat kami ,dan kegiatan yang ada di segoroyo dengan pelatihan yang sesuai dengan PPR tersebut itu bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi PPR itu sendiri keluarga dan juga lingkungan disekitar PPR.

Bentuk perlindungan yang dikeluarkan setelah SK diterbitkan oleh pemerintah desa misalnya program ,kegiatan dan dukungan yang lain yaitu segala kegiatan yang ada di segoroyoso sangat diperkenankan untuk kegiatan PPR di Desa Segoroyoso dan juga ikut perencanaan pembangunan desa dengan cara rencana diikutkan dalam musrenbangdus, musrenbangdes. Bentuk lain juga ada seperti pelatihan memasak kue dari BLK dilaksanakan di desa , kemudian desa juga sangat terbuka untuk PPR karena sudah di terbitkan SK bagi PPR, dan PPR berhak menggunakan segala fasilitas yang ada di desa,PPR di Segoroyaso juga sudah punya produk yaitu krupuk kulit joos pedas manis salah satu produk unggulan dari PPR Bunda Berkarya. Dan dari pelatihan, salah satu anggota sudah mendapatkan pesanan rutin tahu bakso sampai ribuan.

Wawancara dengan Bapak Parja, S.T., M.Si. (Kepala Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul)



Kami selaku pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk membuat Surat Keputusan (SK) lembaga/organisasi yang ada di desa ini. Karena Surat Keputusan ini adalah syarat mutlak suatu lembaga untuk bisa mengakses bantuan apa saja yang ada di desa, kabupaten maupun provinsi. Dengan ada nya Surat Keputusan keberadaan pengurus dan anggota sudah diakui oleh desa dan dimengerti adanya Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda (SPPR KB) di Desa Bangunjiwo.



Dok.: SK Pengakuan dan Pencatatan SPPR dari Pemerintah Desa Bangunjiwo
Kec Kasihan Kab Bantul, DIY

Dengan adanya Surat Keputusan Organisasi/Serikat bisa digunakan sebagaimana mestinya. Contohnya: dapat digunakan untuk mengakses program yang ada di Desa atau yang lebih tinggi lagi. Dan semua lembaga/organisasi yang ada di Bangunjiwo ini sudah mendapatkan Surat Keputusan dari desa Bangunjiwo.

Ke depannya jika nanti ada pergantian pengurus segera melapor ke Pemerintah Desa untuk mendapatkan Surat Keputusan yang baru. Setelah Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda mendapatkan Surat Keputusan dari Pemerintah Desa Bangunjiwo, Desa Bangunjiwo memberikan Pelatihan Sablon dan Batik Tulis. Untuk Pelatihan Sablon dari Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda yang ikut ada 16 orang, dan setiap orang rata-rata mendapat anggaran

untuk mendapatkan pelatihan dan alat kurang lebih 2 juta. Untuk Pelatihan Batik Tulis, anggota Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda yang ikut ada 4 orang.

Sebenarnya semua desa bisa menganggarkan peningkatan kapasitas untuk lembaga/organisasi. Contohnya pelatihan meningkatkan ketrampilan dengan tujuan masyarakat bisa mandiri meningkatkan penghasilan tambahan untuk keluarga.

Semua lembaga/organsasi yang sudah mendapatkan Surat Keputusan diakui keberadaanya dan difasilitasi secara bergilir. Keterlibatan atau keaktifan anggota dan pengurus Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda sowan-sowan ke Pemerintahan Desa ini kurang lebih sudah satu tahun. Dan dibanding dengan lembaga/organisasi lain ini baru. Dan dari Pemerintah Desa untuk saya bisa memberikan pelatihan sesuai apa yang sudah diajukan. Dengan dikeluarkan Surat Keputusan dari Desa berarti Desa sudah mengakui keberadaan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda. Apabila Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Kasih Bunda akan mengakses program Pemerintah yang lebih tinggi Desa harus mengetahui.

Wawancara dengan Bapak Harmawan (Lurah Desa Bawuran, Pleret Bantul)



Desa Bawuran mengeluarkan Surat Keputusan untuk Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) karena Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) meminta. Desa Bawuran memberikan manfaat lebih kepada warga. Program yang bisa diakses setelah dikeluarkan Surat Keputusan dari Desa Bawuran diantaranya : Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) bisa mengikuti Pelatihan Membuat Kue Kering.

Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) sudah mendaftarkan ke Balai Desa Bawuran untuk bisa ikut mengakses tempat wisata dan ke depan bisa menjual produk-produk yang dihasilkan oleh Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM). Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) diresmikan di bulan November 2016. Jadi Desa Bawuran belum bisa memasukan Kegiatan- Kegiatan untuk Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM). Karena

RPJMDes sudah diputuskan. Jadi untuk mengusulkan Program di awal tahun. Kemudian tahun berikutnya baru bisa diakses.

Desa Bawuran mengeluarkan Surat Keputusan untuk Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) yaitu agar Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) bisa mengakses bantuan apapun dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas. Contoh : dari Desa, Kabupaten, atau Provinsi. Dan Desa Bawuran lebih mengakui dengan keberadaan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) di Desa Bawuran.



Dokumen SK Pencatatan dari Desa Bawuran Kec Pleret Kab Bantul

Keterlibatan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan Bunda Mandiri (SPPR BM) di pemerintah Desa Bawuran belum maksimal, mudah- mudahan kedepan semakin terlibat sebenarnya kalau suatu Lembaga/ Organisasi di Desa Bawuran itu aktif dalam kegiatan Pemerintah Desa Bawuran itu akan mendorong bagaimana lembaga itu mendapatkan pelatihan-pelatihan.

Wawancara dengan Bapak Narotama, S.STP, M.Si. (Lurah Cokrodiningratan, Kec Jetis, Kota Yogyakarta)



Sebelum ada penyusunan SK, Ibu-ibu PPR Cokrodiningratan bersama YASANTI kulonuwun ke kelurahan dan sampaikan maksud dan tujuan. Cokrodiningratan sebagai kelurahan inklusi. Ada 5 unsur salah satunya perempuan. Kami sambut baik program perlindungan PPR di Cokrodiningratan. PPR dapat berdaya dan beri support pada warga. Silakan dibentuk wadah ke depan bisa diarahkan dengan libatkan kegiatan-kegiatan di kelurahan. Tanpa ada lembaga, tidak bisa untuk sasaran program. SK untuk pintu masuk program.



Dok. Foto SK Pengakuan dan Pencatatan SPPR Sekar Melati dari Pemerintah Kelurahan Cokrodiningratan Jetis Kota Yogyakarta

Cokrodiningratan juara Lomba Desa/ Kelurahan Inklusi tingkat DIY. Menampilkan kegiatan-kegiatan menonjol termasuk kelompok PPR. Ke depan, ada Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMkelurahan). Usaha dari Warga di wilayah kelurahan Cokrodiningratan, akan digunakan sendiri. Misal : snack, jasa pembuatan makanan. Dalam wadah bersama PKK dan PPR. Bidang kuliner untuk kesejahteraan kepada Warga. Ada musrenbang agar PPR bisa hadir.

Kendala/tantangannya yaitu PPR perlu ada sosialisasi, masuk di temu organisasi di kelurahan. Sosialisasi juga untuk usulkan kegiatan-kegiatan PPR. Harapan ke depan Pengurus PPR lebih aktif lagi. Selama ini masih banyak yang asing dengan istilah PPR, agar aktif di musrenbangkel dan usulkan program dan kegiatan. Pemerintah kelurahan sudah lakukan perencanaan program berbasis kampung. Jadi harapannya PPR tiap kampung juga ada, ada delegasi atau perwakilannya. PPR kelurahan dibawahnya PPR kampung. Peserta lebih banyak, sasaran lebih tepat. Evaluasi selama ini, kalau ada pelatihan tingkat kelurahan, pelatihan selesai ya sudah tidak ada tindak lanjut, tidak ada keberlanjutan. Harapan ke depan dengan basis tingkat kampung ada keberlanjutan. Misal : pelatihan rajut tingkat kelurahan susah dikontrol. Fokus di kampung misal batik jumputan. Lakukan pelatihan batik jumputan di kampung, bisa fokus, PPR ada di tiap kampung. Harus punya icon, kampung kuliner, wisata, budaya. Saya lebih senang PPR pro aktif dari bawah ke atas, sesuai kebutuhan yaitu PPR berbasis kampung, karena kalau basis RW terlalu kecil, basis kelurahan terlalu besar. Silakan berinovasi apabila ada program sampaikan ke kelurahan

dan harus bertanggung jawab. Untuk kegiatan kelurahan di 2019, saya akan terbuka ke PPR kira-kira mana program atau kegiatan di kelurahan yang pas sesuai kebutuhan PPR, saya dukung dan libatkan.

Wawancara dengan Ibu Sugiharti, SIP (Lurah Tahunan, Kec Umbulharjo, Kota Yogyakarta)



Kami atas nama kelurahan Tahunan mengucapkan terima kasih dari sekian kelurahan di Kota Yogyakarta, mendapatkan program dari Bappenas untuk perlindungan pekerja rumahan khususnya SPPR Bunda Mulia. Menaungi hukum perlindungan PPR melalui SK Nomor 151/Kep/Tahunan/2018 tertanggal 4 September 2018 terkait SK Pengakuan SPPR yaitu susunan pengurus SPPR Bunda Mulia. PPR harus dilindungi hak-haknya. Perempuan sebagai salah satu pilar pembangunan sehingga dibutuhkan regulasi/aturan yang melindungi hak-hak perempuan dalam hal ini PPR.

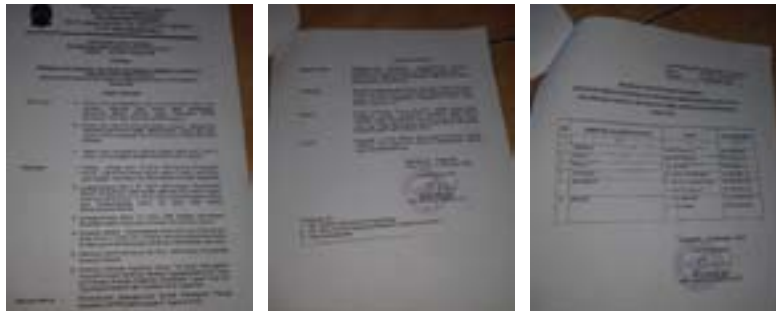


Foto. Dokumen SK Pencatatan dan Pengakuan SPPR Bunda Mulia dari Pemerintah Kelurahan Tahunan Umbulharjo Kota Yogyakarta

Kendala/tantangan terkait pemahaman terhadap PPR. Belum semua lembaga sosial memahami apa itu PPR, misal LPMK dll, saya selaku Lurah baru mengetahui ada organisasi yang mendampingi “Pekerja Rumahan” setelah ada program perlindungan PPR di Tahunan. Pemahaman kami PPR sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT) padahal bukan. Perlu ada sosialisasi, sinergi dan mestinya ada penguatan kapasitas untuk sosialisasi dan pemahaman terhadap lembaga/organisasi baru di Tahunan, yaitu SPPR Bunda Mulia. Karena berbeda dengan PKK yang secara umum orang sudah mengenal, sejak saya lahir PKK sudah ada. Perlu sosialisasi berjenjang secara bersama-sama, ke jajaran RT, RW, BKM, kelurahan dll. Karena masih banyak yang awam terhadap PPR (Perempuan Pekerja Rumahan).

Harapan ke depan setelah terbit SK, harapannya SPPR Bunda Mulia dapat mendukung program pemerintahan kelurahan Tahunan. Pemerintah Tahunan akan melakukan temu berkala/intensif dan sinergi dengan ibu-ibu pengurus SPPR. Agar mengetahui program apa yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk menguatkan organisasi PPR. Akan duduk bersama-sama dengan pengurus, mengetahui roh perjuangan PPR, arahnya kemana ke depannya. Langkah-langkah perlindungan PPR lingkup/tingkat kelurahan Tahunan misal persoalan : didzolimi majikan, dorongan upah standar UMR minimal nguwongke atas apa yang telah diberikan PPR terhadap majikan (pemberi kerja) dapat sebanding dengan upah yang diterima. Pengurus SPPR diajak ikut dalam Musrenbangkel. Program dari pemerintah kelurahan Tahunan pasti harus masuk di dokumen Musrenbangkel. Kecuali program dari APBN/Bappenas,

Pemerintah Kelurahan Tahunan siap atau “*welcome*” terhadap keberadaan PPR.

Wawancara dengan Ibu Maryanti (Sekretaris Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul)



Saya selaku Pamong Desa Wukirsari mendukung serikat perempuan yang ada di wilayah Wukirsari karena dengan adanya serikat perempuan khususnya di wilayah Wukirsari kami dari pihak pemerintah desa sangat mendukung dimana bisa dikembangkan potensi yang dimiliki, sehingga kaum perempuan bisa mandiri dan menambah *income*/pendapatan keluarga. Selain itu dengan adanya organisasi serikat perempuan, pemerintah desa dalam menyalurkan program-program yang ada di desa sangatlah mudah karena sudah ada wadah untuk menampung kegiatan-kegiatan yang ada di desa.

Bentuk dukungan dari pemerintah desa untuk SPPR di Wukirsari ini yaitu baru bisa pemberian Surat Keputusan (SK) Lurah pada bulan Januari 2018. Yang intinya setelah mendapatkan SK nanti pemerintah desa bisa membentuk, mengikutsertakan PPR dalam kegiatan-kegiatan yang ada di APBDES.

Pemerintah Desa akan melibatkan PPR dalam kegiatan yang ada di desa dan mengharapkan supaya PPR tetap semangat untuk mencapai kemandirian dan semoga bertambah anggotanya dan dengan adanya SK, PPR bisa mengajukan proposal-proposal pelatihan apapun. Untuk ikut dalam Murenbangdesitu dimulai dari musdus dulu, jadi PPR itu ngomong/ matur sama Pak Dukuh untuk diikutsertakan dalam musdus dahulu sehingga Pemerintah Desa Wukirsari tinggal menindaklanjutinya.

Wawancara dengan Ibu Amin Muftiyanah (Direktur YASANTI)



Saya sangat mendukung perjuangan pengakuan dan perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) karena memang YASANTI konsen di isu pekerja rumahan sehingga hal ini perlu kita dukung untuk mendorong adanya kebijakan dan perlindungan bagi PPR, selain itu kami mengadakan penguatan kapasitas untuk PPR dan diharapkan dengan penguatan kapasitas tersebut PPR mampu mengorganisir diri mereka, kemudian bisa melakukan advokasi untuk mereka sendiri.

Bentuk dukungan yaitu dengan melakukan pelatihan dengan melakukan pengorganisasian PPR mulai dari tingkat desa hingga ke nasional dengan tujuan untuk memperjuangkan perlindungan, selanjutnya memperkuat kapasitas SDM dari PPR dengan cara memperkuat organisasi dan *skill* dengan pengetahuan untuk mendukung kerja-kerja dari PPR. Dengan kapasitas yang di miliki oleh PPR, bersama YASANTI melakukan advokasi ke Pemerintah.

Saran dan masukan buat PPR ke depan, PPR memperkuat diri dengan cara berorganisasi, karena advokasi tidak bisa dilakukan sendirian dan penguatan kapasitas secara skill dan wawasan di manapun dan kapan pun terkait pengetahuan tentang perburuan tetang organisasi dan juga kaitanya dengan isu-isu lain yang mendukung terkait hak-hak asasi perempuan. Perlu mengkomunikasikan ke lembaga terkait misalnya audiensi ,lobi diskusi dengan lembaga legislatif maupun eksekutif untuk perlindungan jangan lupa melibatkan jaringan mengkampanyekan bahwa PPR itu ada ke masyarakat luas, karena PPR itu merupakan isu baru dan dapat dikampanyekan melalui media sosial, misalnya *sharing* apa yang sudah dilakukan PPR mulai dari penguatan kapasitas bagaimana organisasi berjalan, bagaimana memperkuat organisasi, juga memperkuat ekonomi. Karena ketika PPR berdaya di ekonomi, PPR akan solid organisasinya .

Wawancara dengan Hikmah Diniah (Tim MAMPU)



Kalau pertanyaanya kenapa saya mendukung perjuangan teman-teman Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) terutama di Yogya, demi memperjuangkan hak atas kerja layak bagi Pekerja Rumahan itu banyak, sejak YASANTI berdiri di tahun 1982 memilih fokus terhadap perempuan. Dengan berjalanya waktu beberapa tahun kemudian YASANTI memilih fokus ke Perempuan Pekerja. Di tahun 1990 fokus ke Buruh Gendong selanjutnya di tahun 2000 awal YASANTI sudah melakukan pendampingan terhadap perempuan yang memang saat itu belum melakukan penguatan hak atas kerja layak bagi Pekerja Rumahan.

Sejak saya masuk Januari 2012, YASANTI belum secara langsung, perjuangan advokasinya untuk Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) tetapi melakukan pendampingan untuk penguatan Ekonomi kelompok Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) di Desa Leyangan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

dan di Kelurahan Notoprajan Kota Yogyakarta, Provinsi DIY.

Pada tahun 2014 kemudian YASANTI mulai melakukan pengorganisasian dan advokasi hak atas kerja layak bagi perempuan Pekerja Rumahan di DIY dan Jawa Tengah kerjasama dengan ILO MAMPU. Sejak saat itu saya mulai menyusun program dan strategi dalam melakukan pengorganisasian dan advokasi bagi pekerja rumahan di DIY dan Jawa Tengah

Banyak hal yang kemudian saya secara pribadi, bersama Perempuan Pekerja Rumahan dan jaringan menyusun kurikulum dan modul terkait kepemimpinan feminis berkelanjutan bagi Perempuan Pekerja Rumahan dengan tujuan untuk membangun dan memperkuat pengetahuan dan kesadaran perempuan pekerja rumahan demi perjuangan hak atas kerja yang layak. Bersama pemimpin PPR saya menyusun langkah-langkah strategis untuk perjuangan teman-teman salah satunya advokasi Pengakuan Keberadaan teman-teman Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) di Yogya dengan target adanya peraturan yang melindungi pekerja rumahan. Awalnya Kami melihat memang di Pemerintah Yogya belum tahu keberadaan Pekerja Rumahan apalagi memberi perlindungan. YASANTI bersemangat untuk melakukan advokasi terutama kampanye/sosialisasi (Ada Lho Pekerja Rumahan) untuk Pemerintah Masyarakat sekitar dan menyadarkan Pekerja Rumahan itu sendiri.

Berawal dari situ dan menjadikan komitmen secara personal di Organisasi untuk terus melakukan pendampingan terhadap Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) terutama saat ini yang sudah baik di Bantul ataupun di Kota Yogya. Awal

YASANTI melakukan pendampingan secara masif di wilayah Yogya dan bersama beberapa staf yang dipilih terlibat dalam tim program MAMPU, ada Mbak Ana, Mbak Dian, Mbak Candra, Mbak Asih, Mbak Rima, dan Mbak Martini, Mbak Ratna, Mbak Dini yang memang di tugaskan langsung oleh YASANTI untuk melakukan Pendampingan kepada Perempuan Pekerja Rumahan (PPR), dan sejak awal tahun 2015 YASANTI bekerjasama dengan Program MAMPU.

Dukungan yang dilakukan oleh YASANTI ini bertujuan agar Perempuan Pekerja Rumahan (PPR) dapat memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melakukan advokasi hak atas kerja layak terutama advokasi pengakuan bagi mereka “Pekerja Rumahan”, membangun kesadaran dibanyak Pekerja Rumahan di beberapa Desa terkait pentingnya berkelompok/ berorganisasi/berserikat, agar bersama-sama memperjuangkan hak mereka. Setelah mereka berkelompok kami YASANTI mengajak teman-teman Ibu Ibu Pekerja Rumahan yang telah bergabung di kelompok atau serikat, melakukan kerjasama untuk mendapatkan dukungan *stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya.

Bentuk dukungan dari *stakeholder* (pemangku kepentingan) itu dapat mendukung banyak strategi advokasi kampanye yang dilakukan YASANTI bagi PPR atau Serikat Perempuan Pekerja Rumahan. Saat ini ada 10 serikat perempuan pekerja rumahan “SPPR” di DIY. Dulu SPPR hanya ada 1 serikat, kemudian berkembang menjadi 5, menjadi 6, dan 10 di Provinsi DIY (Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta). Pilihan bentuk

organisasi adalah serikat tidak hanya dalam gerakan, tetapi juga bagaimana serikat pekerja rumahan bisa diakui dan dicatat di SKPD terkait, yaitu Disnakertrans dan Pemerintah Desa juga Kelurahan. Yang mengacu pada Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa Serikat perlu adanya Pengakuan secara tertulis berupa Bukti Pencatatan Serikat lewat Dinas-Dinas terkait (Disnaker).

Untuk mengeluarkan pengakuan dalam bentuk Bukti Pencatatan dan alhamdulillah sudah didukung dengan Bukti Pencatatan dari 5 Serikat di Bantul. Dengan adanya Bukti Pencatatan dari Dinas Ketenagakerjaan di Bantul berdampak baik dari pemerintah-pemerintah di 5 Desa di Bantul dan 2 Kelurahan di Kota Yogyakarta. Karena saat ini telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan peresmian Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) di Desa dan Kelurahan masing-masing. Memberikan perlindungan, sehingga berdampak pada berikutnya akses-akses program terutama penguatan Kapasitas dan Pelatihan-pelatihan.

Keberhasilan yang dianggap lebih, semuanya adalah keberhasilan yang luar biasa mulai dari 1 kelompok/serikat berkembang menjadi 5 sampai 10 Serikat. Dari yang tidak diketahui sampai di ketahui dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang menjadi kebanggaan tersendiri. Pemerintah dengan sangat terbukanya dan cepat memberi dukungan terutama dikeluarkan Kebijakan Secara Tertulis. Baik Bukti Pencatatan serikat dari Dinas Ketenagakerjaan Bantul ataupun SK pengakuan PPR

dari Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Kenapa saya bilang itu keberhasilan yang luar biasa? Karena teman-teman akhirnya bisa mengakses banyak program, bisa mendapat perlindungan dari Pemerintah tingkat bawah sampai atas. Dilibatkan dalam Musrengbangdus dan Musrengbangdes/kelurahan dan musyawarah-musyawarah pembangunan lainnya. Dengan dikeluarkan Bukti Pencatatan Disnaker dan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Desa/Kelurahan menjadi tonggak bagi teman-teman, sebagai alat untuk mempermudah perjuangan teman-teman PPR.

Saran dan usulan ke depan. YASANTI berharap semua teman-teman yang sudah mendapatkan pengakuan di DIY, tentunya ini berbeda dengan teman-teman di 7 Provinsi lainnya yang sangat susah mendapatkan pengakuan secara lisan pun susah, apalagi secara tertulis. Ini menjadi pembangkit semangat untuk selalu memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita organisasi. Kemudian jadikanlah pengakuan yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten dan Kota terkait Surat Keputusan (SK) dan Bukti Pencatatan secara tertulis menjadikan semangat untuk terus memperluas gerakan tidak hanya di 10 serikat saja tetapi akan melahirkan puluhan atau banyak serikat lainnya di wilayah desa/kelurahan di DIY.

Pengakuan secara tertulis di tingkat Desa dan Kelurahan, Kota dan Kabupaten ini, dapat menjadi alat memperluas organisasi gerakan Pekerja Rumahan baik di Bantul/Kota dan alangkah baiknya di wilayah-wilayah lainnya di Bantul dan Kota. Dengan diberikan Surat Keputusan (SK) dari Desa dan

Kelurahan, Bukti Pencatatan dari Disnakertrans Kabupaten dan Kota, teman-teman PPR bisa mengawal Undang-undang Desa yang diimplementasikan di desa dimana teman-teman berada. 10 Serikat ini terlibat dalam proses pembangunan dan mengusulkan banyak program yang sudah disepakati bersama di serikat.

Saran saya kedepan dan teruslah membangun kebersamaan di dalam serikatnya dan tetap solid dan jangan lupa walaupun sudah ada Surat Keputusan (SK) dan Bukti Pencatatan Serikat bukan berarti semua perjuangan sudah tercapai dan berakhir.

Wawancara dengan Ibu Martini (Tim YASANTI)



Bentuk dukungan Bu Martini selaku Tim dari YASANTI dengan adanya PPR Bantul dan Kota itu bisa macam-macam, tidak harus berbentuk uang. Jadi saya lebih tertuju kepada dukungan dalam bentuk pikiran dan tenaga, mengarahkan dan menghubungkan dengan lembaga lain termasuk dengan pemerintah. Misalnya: bisa terbentuk serikat, sehingga dengan adanya serikat harapannya ada peningkatan dan dengan berserikat banyak hal yang bisa diraih. Contoh: Yang dulunya belum saling kenal meskipun satu desa dengan berserikat jadi saling kenal dan saling berbagi ilmu dan pengalaman, saling menyemangati dan justru bisa menjadi saudara. Jadi intinya dengan terbentuknya serikat, di situlah bisa sebagai wadah/tampungan berbagai pengalaman. Jadi kalau sudah serikat itu akan lebih kuat dan lebih diakui.

Pekerja rumahan itu punya keistimewaan dan keunikan. Rata-rata masih muda, meskipun ada sebagian yang sudah tua,

tapi semangat untuk bekerja dan berorganisasi sangat bagus, apalagi rata-rata Ibu-ibu pekerja rumahan berkumpul dalam satu lokasi atau desa, sehingga lebih mudah untuk diorganisasi dan akan lebih terlihat kemajuannya. PPR punya andil besar untuk pengusaha, tanpa PPR tak akan sukses. Bagaimanapun juga PPR merupakan salah satu penyokong ekonomi negara.

Kami Tim YASANTI mendukung adanya serikat supaya perempuan pekerja rumahan bisa lebih maju dan berani untuk bernegosiasi dan bersosialisasi dengan pemerintah. Sehingga PPR lebih berani untuk di depan dan bisa mengusulkan atau mengajukan proposal-proposal untuk kemajuan serikatnya.

Untuk sarannya dengan adanya SK Pengakuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan Bukti Pencatatan Disnaker maka itu dijadikan acuan atau pegangan sehingga PPR semakin kuat dengan keberadaannya. Untuk masukannya untuk lebih semangat dan ditambah anggotanya. Karena dengan adanya SK dan Bukti Pencatatan maka PPR akan mudah mengakses program-program yang ada di pemerintahan desa/ kelurahan maupun kabupaten / kota serta provinsi.

Wawancara dengan Gieyanto (Perhimpunan Solidaritas Buruh /PSB)



Kami mendukung perjuangan Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) bahwa kami sadar, belajar dari pengalaman tentu, berasal dari krisis 1998, yang berperan serta sangat besar, yang menghasilkan sistem ekonomi bangsa ini ada di sektor produksi industri padat karya. Yang didominasi kekuatan modal besar, itu tidak bisa menjadi pondasi ekonomi bangsa. Dengan kredit macetnya pengusaha besar menjadikan persoalan, sedangkan pekerja informal yang menyelamatkan tragedi 1998 ini. Di situlah saya mendukung dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan, pekerja informal atau pekerja rumahan khususnya bagi kaum perempuan.

Di posisi sampai hari ini pun buruh perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Berawal dari itulah kemudian ingin terlibat dan mendorong teman-teman perempuan pekerja rumahan (PPR) mengkualitaskan diri

membuktikan kepada negara. Dari situlah pertumbuhan ekonomi meningkat.

Bentuk dukungan, yaitu dengan mensosialisasikan perempuan pekerja rumahan (PPR) dan produk-produk yang di hasilkan kepada teman-teman serikat buruh atau serikat pekerja di pertemuan-pertemuan mereka.

Saran-saran dan masukan yaitu Pekerja berbasis kebijakan ,rencanakerja strategis (renstra) ada pegangan renstra agar teman-teman bekerja secara terencana, sistematis, terukur, sehingga menjadi organisasi gerakan. PPR juga mengorganisasi Pekerja Informal lainnya supaya kita bisa mempunyai peluang untuk memasarkan produk kita, juga untuk berjejaring dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bisa mempunyai *show room* permanen untuk mempromosikan hasil produk. Kampanye produk melalui desa-desa/kelurahan. Kesekretariatan yang hidup contohnya ada diskusi rutin, pendidikan/sekolah rutin yang sesuai dengan kebutuhan. Dan sebenarnya adanya dampingan YASANTI sangat bagus dan sekolah-sekolah yang diberikan oleh YASANTI sangat mendukung perjuangan PPR. Dan bagaimana teman-teman PPR untuk mempraktekan ilmu –ilmu yang sudah didapat dari YASANTI. Terakhir, PPR ziarah ke makam Pejuang Buruh, yaitu Almarhumah Marsinah dengan mengingat perjuangan Marsinah.

Wawancara dengan Jumiyeem / Lek Jum (Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga/ SPRT)



Serikat Pekerja Rumah Tangga Tunas Mulia mendukung sekali perjuangan PPR, yang pertama sebagai anggota jaringan akan selalu mendukung perjuangan anggota jaringan yang lain, yang kedua yang di lakukan PPR dalam memperjuangkan hak sebagai pekerja harus wajib didukung oleh siapa saja, yang ketiga permasalahan atau situasi kerja yang dihadapi PPR sama dengan SPRT diantaranya belum ada perlindungan hukum khusus, banyak terjadi pelanggaran hak (masih jauh dari situasi kerja layak).

Bentuk dukungan dari SPRT yaitu pernah terlibat dalam proses pendataan PPR, terlibat dalam kegiatan advokasi/ kampanye bersama, audiensi-audiensi, baik tingkat lokal maupun nasional, aksi demonstrasi di momen-momen penting, misalnya di Hari Buruh Internasional, siaran radio, dll.

Saran dan masukan buat PPR, tetap semangat dalam memperjuangkan kerja layak bagi PPR, dan memperjuangkan undang-undang bagi PPR.

Wawancara dengan Tri Wahyu (Indonesian Court Monitoring /ICM)



Saya mendukung adanya pengakuan dan perlindungan bagi serikat PPR di desa maupun di kota, yang pertama saya dari ICM (Indonesian Court Monitoring), salah satu lembaga yang *concern* di perjuangan pemantauan dan advokasi pemenuhan keadilan dan kita salah satu mitra PPR. Di awal ada proses ICM ikut bareng bersama PPR, ICM adalah kawan YASANTI dalam berjejaring di DIY. Untuk kemudian mulai dilibatkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan, terkait dengan advokasi pekerja rumahan, dan dukungan untuk perjuangan pekerja rumahan. Dan dari itu berproses kemudian ICM tidak hanya bermitra dengan YASANTI saja, tetapi juga bermitra dengan Mbak Wati, Mbak Warisah, dan teman-teman seperjuangan PPR dan sangat mendukung adanya PPR desa dan kota di DIY serta yang berada di Jawa Tengah.

Bentuk-bentuk dukungan yang diberikan kepada PPR desa maupun kota tentunya kemudian kita ikut rapat jaringan-jaringan untuk menyusun kemudian dulu ada semacam persiapan untuk peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) bersama PPR, kemudian yang lain tentang menyusun kebutuhan advokasi ada semacam modul atau workshop untuk penyusunan sekolah/“sinau bebarengan” (belajar bersama) untuk PPR atau buruh rumahan, yang lainnya adalah daya dukung untuk menyusun lembar kebijakan untuk perlindungan bagi PPR yang berada di DIY dan Jawa Tengah.

Sangat luar biasa SK Pengakuan PPR ini, di tingkat desa/kelurahan menjadi lebih konkrit. Di desa ada pengakuan perlindungan dari Pemerintah Desa untuk teman-teman PPR sesuai dari 5 desa yaitu di Bantul dan beberapa Kelurahan di Kota Yogyakarta. Dan ini juga bisa menjadi dokumen “pintu masuk” untuk mengakses program dan kegiatan bagi PPR, termasuk melibatkan PPR dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Masukannya barangkali agar dokumen ini tentu kemudian menjadi pegangan untuk PPR, maknanya kalau bisa SK ini bukan sebagai “macan kertas”, tetapi sarannya adalah “dokumen hidup” dimana dokumen hidup ini menjadi satu bahan kerjasama perjuangan antara PPR dan pemerintah desa/kelurahan. Contoh: PPR sebagai warga desa bisa “nyengkuyung”/mendukung atau menyumbang pemikiran bagi Pemerintah Desa/Kelurahan. Bagi desa/kelurahan kalau meminjam salah satu pernyataan dari Kepala Desa di Bantul, bahwa Kepala Desa ini senang

karena terbantu program-programnya. Untuk pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan dan melaksanakan dana desa itu bisa dimanfaatkan warga termasuk PPR artinya tidak berhenti di kertas/SK, tetapi akan menjadi dokumen hidup kerjasama PPR dan pemerintah desa/kelurahan dan harapannya bisa disengkuyung/didukung bersama oleh teman-teman/ komunitas warga desa/kelurahan yang lain.

Wawancara dengan Bapak Risdiyanto

(Juragan tas batik perca)



Dukungan saya terkait terbentuknya kelompok organisasi Serikat PPR Kreatif Bunda adalah dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk berorganisasi, selain itu bentuk dukungan saya adalah menyempatkan hadir jika saya di undang dari organisasi Kreatif Bunda. Menurut saya dengan berorganisasi mereka menjadi lebih kuat, seperti misalnya bermaksud mengakses program dari Pemerintah.

Masukan saya kepada Kreatif Bunda semoga Kreatif Bunda bisa tetap eksis dan jangan lupa untuk bekerja/disambi, meski sibuk berorganisasi karena itu untuk kesejahteraan mereka juga. Jaga kualitas jahitan agar pekerjaan selalu ada, karena kalau kualitas bagus ya pelanggan ada terus dan pekerjaan juga akan ada terus, saling tolong-menolong antara juragan dan karyawan, ada pertemuan silakan, tetapi kita juga perlu bantuan untuk mengerjakan jahitan.

Harapan saya untuk Kreatif Bunda semoga ke depan Kreatif Bunda bisa berkembang anggotanya (dalam hal ini PPR) tidak

hanya di Wonolelo, Pleret, Bantul, tetapi di daerah lain dan di Kelurahan lain di DIY ada organisasi PPR-nya juga.

PENUTUP

Praktek baik adanya SK Pengakuan dan Pencatatan dari Desa/Kelurahan dan Surat Bukti Pencatatan dari Disnaker membuktikan bahwa Serikat Perempuan Pekerja Rumahan (SPPR) di DIY (Bantul dan Kota Yogyakarta) nyata-nyata sudah mendapatkan pengakuan dan perlindungan di DIY, tentunya ini berbeda dengan teman-teman PPR di Provinsi lainnya yang masih terus berjuang mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

Pengakuan SPPR yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten (Disnaker) terkait Surat Keputusan (SK) dan Bukti Pencatatan secara tertulis tersebut dapat menjadi modal advokasi untuk memperluas gerakan tidak hanya di 10 serikat saja (yang telah ada) tetapi juga akan melahirkan makin banyak serikat lainnya di wilayah desa/kelurahan di DIY.

Dengan diberikan Surat Keputusan (SK) dari Desa dan Kelurahan, Bukti Pencatatan dari Disnakertrans Kabupaten dan Kota, PPR dapat pula mengawal Undang-undang Desa yang diimplementasikan di desa. Dalam praktek baik termuat bahwa Serikat PPR di DIY (di Bantul dan Kota Yogya) sudah terlibat aktif dalam proses pembangunan dan mengusulkan banyak program yang sudah disepakati bersama di serikat bahkan ada yang sudah dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

Isu pengakuan dan perlindungan pekerja rumahan ini menjadi salah satu isu yang diperhatikan Pemda apalagi bicara

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Sebagaimana informasi disnaker DIY, ke depan juga menjadi perhatian Dinas dan Pemda dan ada kajian serta penelitian lebih lanjut, berdasarkan grand design pemda sebagai bahan strategis mewujudkan regulasi yang berpihak pada perempuan pekerja rumahan (Perda dan Pergub).

Praktek baik pengakuan dan perlindungan PPR di tingkat desa/kelurahan dan kabupaten/kota menjadi pintu masuk strategis bagi Perempuan Pekerja Rumahan terlibat aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan sebagai pelaksanaan komitmen PPR bagian dari Warga ikut ambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan dalam hal ini Goal/ tujuan kesetaraan gender dan pekerjaan yang layak sekaligus mengimplementasikan nyata slogan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan “Tak seorangpun ditinggalkan dalam pembangunan (*No One Left Behind*)”. Pembangunan memang harus memberi manfaat untuk semua serta melibatkan semua kepentingan termasuk kepentingan dan kebutuhan Perempuan Pekerja Rumahan.

Lampiran: Foto-foto Dokumentasi Praktek Baik



Dok. Foto Pembentukan Federasi SPPR Bantul, DIY Pendopo Parasamya Kantor Bupati Bantul 15 Mei 2017



Dok. Foto Pembentukan Federasi SPPR Kota Yogya, DIY di Kantor Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, 23 Oktober 2018



Sarasehan Perlindungan dan Pengakuan Terhadap Pekerja Rumahan di DPRD DIY 26 November 2018

Tanda Bukti Pencatatan dari Disnakertrans

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Gaseot Suberto No. 1 - 55712 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001, tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Nama : Serikat Perempuan Pekerja Rumahani Kasih Bunda (SPPR - KB) Desa Bangunjewo.

Alamat Sekretariat : Dusun Jipengan RT 01 Desa Bangunjewo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Nomor Surat : 02/SPPR-KB-Jan/2017

Tanggal : 13 Januari 2017

Kelengkapan berkas persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16 / MEN / 2001 tanggal 15 Februari 2001, telah dipenuhi, kami terima dan kami catat dengan Nomor Bukti Pencatatan :

Nomor Surat : **96/SPPR-KB/1/2017**

Tanggal : 13 Januari 2017


Dr. ERY MACHMUD HIDAYAT
NIP. 19600408 198603 1005

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Gaseot Suberto No. 1 - 55712 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001, tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Nama : Serikat Perempuan Pekerja Rumahani Bunda Mandiri (SPPR - BM) Desa Bawuran

Alamat Sekretariat : Dusun Senan RT 05 Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.

Nomor Surat : 02/SPPR-BM-Jan/2017

Tanggal : 13 Januari 2017

Kelengkapan berkas persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16 / MEN / 2001 tanggal 15 Februari 2001, telah dipenuhi, kami terima dan kami catat dengan Nomor Bukti Pencatatan :

Nomor Surat : **97/SPPR-BM/1/2017**

Tanggal : 13 Januari 2017


Dr. ERY MACHMUD HIDAYAT
NIP. 19600408 198603 1005

**KEMENTERIAN KEMUKHAAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Alamat: Jl. Kanan No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 545625, 515865,
562682
EMAIL : kppnakertrans@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE e-mail : ugih@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

NAMA : SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEREMPUAN
PEKERJA RUMAHAN MUTIARA BUNDA
ALAMAT : PRENGGAN UTARA KG II NO 42B B RT 26
RW 05 KELURAHAN PRENGGAN
KOTAGEDE, KOTA YOGYAKARTA
NOL SURAT PERMOHONAN : 02/SPPR -MB-SEPT/2018

Kelengkapan persyaratan sesuai pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/Men/2001 telah terpenuhi dan telah kami catat dengan Bukti Pencatatan No. 87/PCT/L/X/2018 Tanggal 18 OKTOBER 2018.

KTPALA
PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA
SITI KURNIAWATI
19640501198003 2 054

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
Jl. Gatot Subroto No. 1 - 57112 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001, tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Nama : Serikat Perempuan Pekerja Rumah Bunda
Berkerja (SPPR - SM) Desa Segoroyoso
Alamat Sekretariat : Srambung RT 02 Desa Segoroyoso, Kecamatan
Plebot, Kabupaten Bantul.
Nomor Surat : 02/SPPR- 00- Jan/2017
Tanggal : 13 Januari 2017

Kelengkapan berkas persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16 / MEN / 2001 tanggal 15 Februari 2001, telah dipenuhi, kami tebli dan kami catat dengan Nomor Bukti Pencatatan :

Nomor Surat : 04/SPPR.31/1/2017
Tanggal : 16 Januari 2017

16 Januari 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. G. GATOT SUBROTO
J. G. GATOT SUBROTO HIDAYAT
19640501198003 1005

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Gatot Subroto No. 1 – 55712 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001, tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Nama : Serikat Perempuan Pekerja Rumah Kreatif Bunda
(SPPR – KB) Desa Wonolelo

Alamat Sekretariat : Dusun Bujung RT 03 Desa Wonolelo, Kecamatan
Pleret, Kabupaten Bantul.

Nomor Surat : 02/SPPR- KB- Jan/2017

Tanggal : 13 Januari 2017

Kelengkapan berkas pernyataan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16 / MEN / 2001 tanggal 15 Februari 2001, telah dipenuhi, telah kami teliti dan telah kami catat dengan Nomor Bukti Pencatatan :

Nomor Surat : **98/SPPr-JL/1/2017**

Tanggal : 13 Januari 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Gatot Subroto No. 1 – 55712 Bantul, Kotak Pos 130 Telp. (0274) 367277

TANDA BUKTI PENCATATAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001, tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Nama : Serikat Perempuan Pekerja Rumah Ngudi Makmur
(SPPR – NM) Desa Wukirsari.

Alamat Sekretariat : Dusun Nogosen II RT 02 Desa Wukirsari,
Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.

Nomor Surat : 02/SPPR- NM- Jan/2017

Tanggal : 13 Januari 2017

Kelengkapan berkas pernyataan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.16 / MEN / 2001 tanggal 15 Februari 2001, telah dipenuhi, kami teliti dan kami catat dengan Nomor Bukti Pencatatan :

Nomor Surat : **99/SPPr-JL/1/2017**

Tanggal : 16 Januari 2017



